



# Laporan Kinerja 2023



**Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Selatan**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat izin dan ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dapat diselesaikan sebagai wujud implementasi SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Walaupun data yang ditampilkan pada Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini masih merupakan data sementara diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun dalam penyajian isinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2024

**KEPALA DINAS**



**Dr. M. Ilyas, ST, M.Sc**

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 197006061996031006

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATAPENGANTAR	
DAFTAR ISI 2	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Struktur Organisasi.....	4
1.2. Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	<b>10</b>
2.1. Rencana Kerja Tahun 2023 .....	10
2.2. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
3.1. Capaian Kinerja Sasaran / IKU Organisasi .....	19
3.2. Kinerja Anggaran .....	90
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	101
3.5 Penghargaan .....	104
<b>BAB IV PENUTUP   106</b>	
4.1. Kesimpulan Capaian Kinerja .....	106
4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	107
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

Adapun uraian Adapun struktur organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub 86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

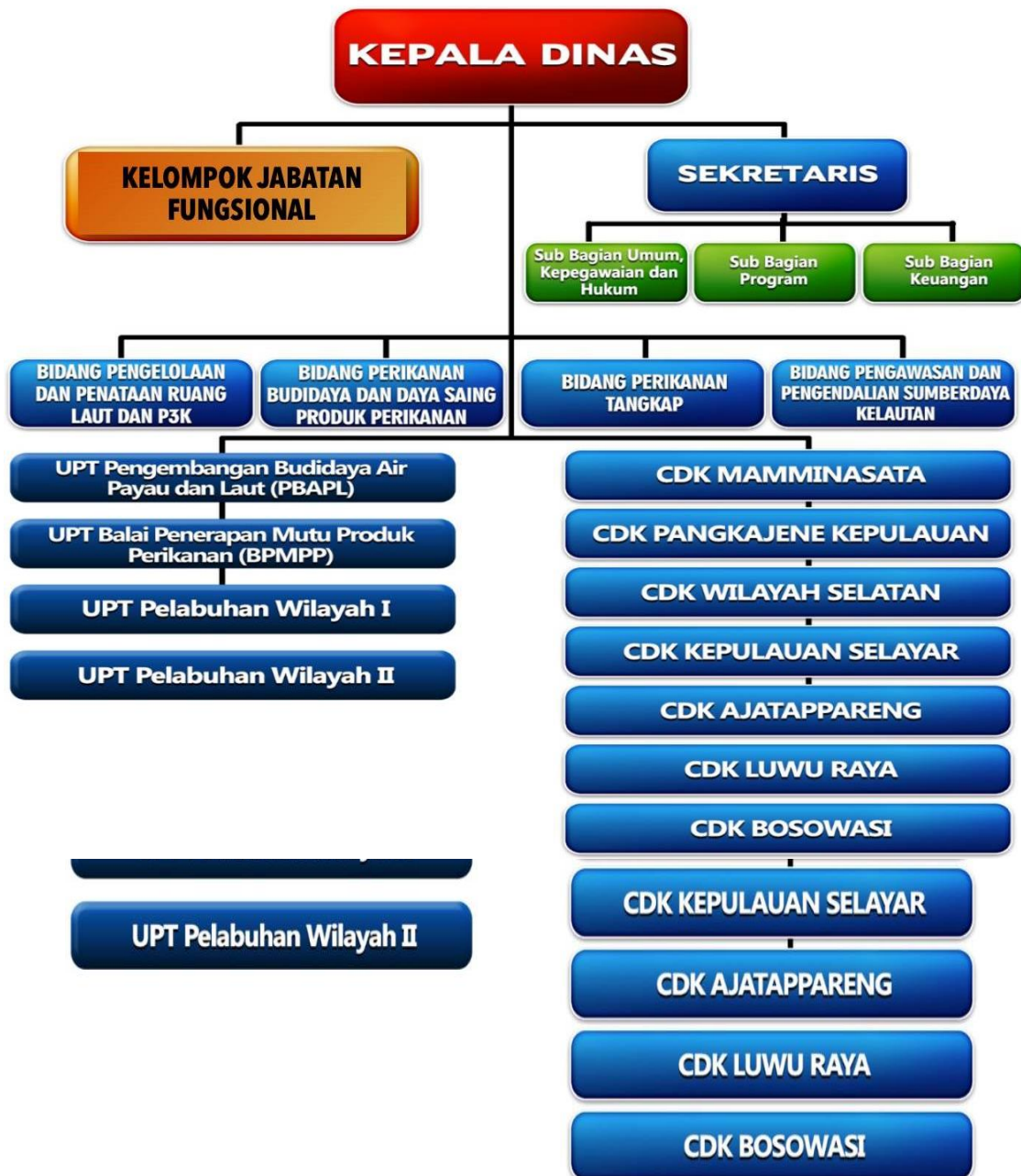
### **1.1. STRUKTUR ORGANISASI**

Organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang (4 Bidang)
4. Kepala UPTD (4 UPTD)
5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (7 CDK)

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

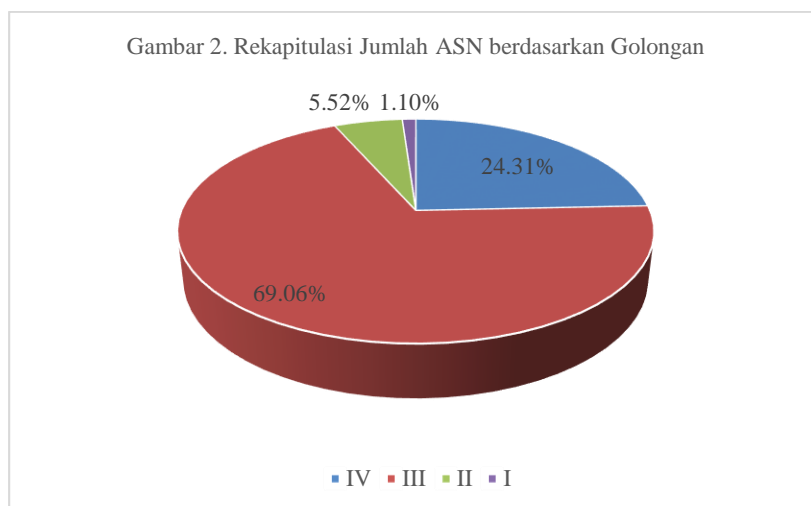
Gambar 1  
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Dalam penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sul-Sel sampai dengan akhir bulan Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.  
Sebaran PNS Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2023 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	
1	I	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2
2	II	0	0	2	0	4	0	4	0	10	0	10
3	III	9	8	6	5	9	8	30	50	54	71	125
4	IV	20	12	6	5	1	0	0	0	27	17	44
<b>Jumlah</b>		29	20	14	10	15	8	34	51	92	89	181



Sebaran PNSD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.  
Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel TA. 2023  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah	Total
		Pria	Wanita	
1	S3	3	2	5
2	S2	27	25	57
3	S1	49	59	108
4	Sarjana Muda	6	0	6
5	SMA	14	3	17
6	SMP	0	0	0
7	SD	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>189</b>

## 1.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi melalui identifikasi masalah pokok, masalah hingga akar masalah sebagai berikut :



Tabel.3

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Menurunnya ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akibat dampak pandemic Covid 19	Adanya pembatasan sosial dalam melakukan aktivitas usaha perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan terjadi perlambatan
2	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur
3	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparatur yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
4	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Pelayanan pelabuhan perikanan, PPI dan TPI tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal</li> <li>• Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan belum Optimal</li> </ul>
6	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
7	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sarana prasarana dan SDM dalam penegak hukum di laut</li> <li>• Kurangnya regulasi terkait penataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan terhadap kepatuhan</li> </ul>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kelengkapan dokumen perizinan
8	Marak terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Pemanfaatan pesisir dan ruang laut belum mengacu pada Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan dan pariwisata khususnya di wilayah laut dan pesisir</li> <li>• Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dasar hukum pemanfaatan ruang laut</li> </ul>
9	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran
10	Mekanisme pengumpulan data perikanan bersifat masif dan belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial
	Data yang terintegrasi Penerapan Teknologi untuk budidaya, penangkapan serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang belum merata	SDM yang masih menerapkan teknologi Lama	Pendampingan dalam penerapan teknologi belum terlaksana dengan baik dan holistik.

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut maka isu strategis Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2021 - 2023 adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing berbasis pengembangan Kawasan dan komoditas unggulan akibat masih

rendahnya SDM yang terampil pada aparaturnya dan pelaku usaha perikanan serta dukungan infrastruktur dan sarana prasarana perikanan.

2. Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih dibawah serta kurangnya akses permodalan untuk mendukung usaha.
3. Degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta masih rendahnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERENCANAAN

Rencana Kinerja pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2023 yaitu :

Tabel 4  
Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2023

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
1.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,41	Kepala Dinas
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	99	
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100	Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	100	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	10,53	
2.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	5.6	Kepala Dinas
		Produksi Perikanan (ton)	4.759.871,9	
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	9.210,12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Produksi perikanan tangkap (ton)	413.030,8	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	78,95	Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
				Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya (Rp.M)	15.958,39	Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselen III)
		Produksi perikanan budidaya (ton)	4.298.391,1	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	100	Kepala UPT BPAPL (Eselon III)
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Produksi garam rakyat (ton)	48.450	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K (eselon III)
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	100	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K dan Kepala CDK (eselon III)
3.	<b>Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan</b>	<b>Konsumsi Ikan (kg/kap/th)</b>	<b>65.9</b>	<b>Kepala Dinas</b>
a.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp. M)	317,28	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dan Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	5.544,1	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dan Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	100	Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
4.	<b>Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku</b>	Nilai Tukar Nelayan	103.19	Kepala Dinas

No	Sasaran dan Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
	usaha kelautan dan perikanan			
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	30,25	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	27,17	
5.	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1.09	Kepala Dinas
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	42,44	
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	35,71	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67.31	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut Pesisir dan P3K dan Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	89.85	Kepala Bidang Pengawasan SDKP dan Kepala CDK (Eselon III)

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; Tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam tatakelola administrasi pemerintahan baik dari segi perencanaan, penganggaran, pengelolaan administrasi PAD, pemeliharaan asset, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor dst. Sehingga perlu dilakukan penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, pada organisasi agar ke depan lebih berkinerja baik dan sesuai pencapaian target indeks reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan; Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, sektor perikanan merupakan sub sektor lapangan usaha pertanian pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Sehingga dalam mewujudkan tujuan ini, terdapat beberapa indikator yang menjadi sasaran pencapaian kinerja tujuan yaitu peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir agar pendapatannya dapat meningkat terutama pada bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan. Pemberdayaan tersebut dalam bentuk pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan berbasis wilayah dan Kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi agar pembangunan dapat berkelanjutan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga jika daya beli masyarakat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan maka permasalahan angka stunting dan angka kemiskinan akan menurun.
3. Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan; Kondisi laut dan perairan di provinsi Sulawesi Selatan cukup memprihatinkan karena terumbu karang, mangrove dan padang lamun sudah banyak yang rusak akibat aktivitas kegiatan pembangunan. Kemudian adanya kebijakan pemerintah terkait penangkapan ikan terukur, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terkait penangkapan ikan yang menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang, kemudian kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen izin usaha agar stok ikan kita tetap terjaga dan lestari. Kemudian dalam rangka mendukung kebijakan global terkait emisi karbon maka peran konservasi Kawasan mangrove menjadi agenda pembangunan di tahun 2023. Selain itu perdagangan karbon menjadi target pada tahun 2023 mengingat aksi rehabilitasi mangrove cukup masif dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 pada RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun 2021 juga dilakukan review RPJMD sesuai OPD baru guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Berdasarkan tema ini, maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

- Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Hilirisasi Perikanan dan peningkatan Sarana Prasarana dari Hulu ke Hilir dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat pesisir pasca pandemik COVID-19;
- Pengembangan Inovasi Teknologi produk hasil perikanan sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing;
- Pengembangan hilirisasi produk kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkarakter;
- Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan.



## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan pelaksanaan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 yang merupakan komitmen pimpinan, merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 5.  
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.	Nilai saki perangkat daerah (%)	86,41
	2.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	99
	3.	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100
Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	4.	Produksi perikanan (ton)	4.759.871,9
	5.	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Perikanan(%)	5,6
Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Konsumsi Ikan	65,9
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	103,19

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
pelaku usaha kelautan dan perikanan			
Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	9.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,09
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	42,44
	11.	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	35,71

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	38.278.920.637
2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	13.535.671.100
3. Pengelolaan perikanan tangkap	37.410.867.789
4. Pengelolaan perikanan budidaya	5.314.667.527
5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan	3.627.801.000
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.852.653.600

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
$\leq 50$ (Sangat Rendah / SR)
$50.1 \leq 65$ (Rendah / R )
$65.1 \leq 75$ (Sedang / S)
$75.1 \leq 90$ (Tinggi / T )
$90.1 \geq$ (Sangat tinggi / ST )

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi I : jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan

pencapaian kinerja yang **semakin baik** atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/jelek** adalah :

$$\% \text{ capaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya **realisasi semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.  
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sul Sel (%)*	5,6	8,6	153,57
		Produksi perikanan (ton)*	4.759.871,9	4.735.190,98	99,48
B	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/Kap/tahun)*	65,9	71,10	107,89
C	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,19	111,49	108,04
D	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,09	1,34	123,34
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas biologis yang aman (%)*	42,44	66,17	155,92
		Persentase penurunan tindakan IUU Fishing (%)	35,71	23,08	64,62
F	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,41	85,8	99,29
		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	99,0	136,4	137,77
		Persentase Nilai Temuan material LHP yang ditindaklanjuti	100	100	100

\*data sementara

### **3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS/ IKU**

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2023 sebagaimana berikut.



## **SASARAN I : Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi**

Terdapat 2 indikator Keberhasilan capaian sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi yaitu :  
(1) produksi perikanan, (2) kontribusi PDRB perikanan.

Tabel 7.  
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sul Sel (%)	5,6	8,61	153,75
	Produksi perikanan (ton)	4.759.871,9	4.735.190,98	99,48
Rata-rata capaian sasaran				126,62

Keterangan : \*data sementara



## IKU 1

## KONTRIBUSI PDRB PERIKANAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan di suatu daerah/wilayah. PDRB atau pendapatan regional di bedakan atas dua bentuk yaitu harga berlaku dan harga konstan yaitu 1) Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflansi dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku, 2) Pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas harga konstan, artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu yang disebut tahun dasar. Data kontribusi PDRB perikanan menggunakan harga belaku dengan tahun dasar tahun 2010 yang diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik. Rumus penghitungan kontribusi PDRB Perikanan adalah :

$$\text{kontribusi PDRB perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor perikanan}}{\text{Nilai PDRB Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

Tabel 8.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan

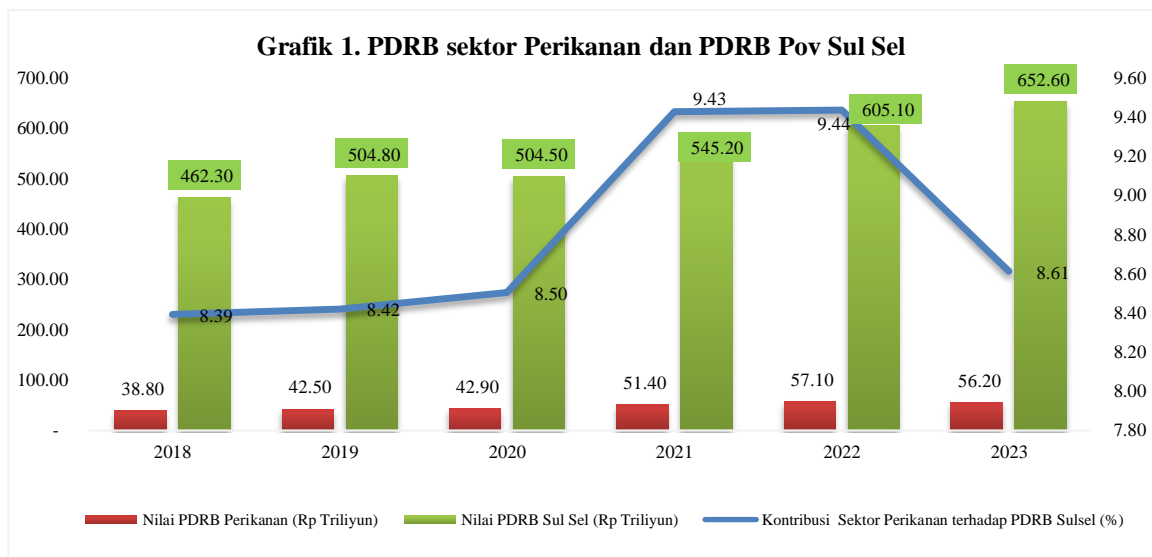
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi*	Target	Capaian	
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8.39	8.42	8.50	9.43	9.44	8,61	5.6	153,57	-

Keterangan : \*data sementara

Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2023 mencapai target sebesar 153,75 % dan turun 8,79% dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018-2023

kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan naik dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,88 %. **Capaian jauh melebihi target karena proyeksi saat penyusunan dokumen renstra perubahan tahun 2020 bahwa pandemi covid19 akan berdampak pada produksi dan nilai produksi ternyata tidak berpengaruh. Oleh karenanya telah dilakukan penyesuaian target pada dokumen perencanaan tahun 2024 - 2026.**

Sebagaimana ditunjukkan grafik 1, Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar 7,85 % tidak seiring dengan nilai PDRB perikanan yang turun sebesar 1,58 % dibandingkan tahun 2022. **Perlambatan pertumbuhan PDRB perikanan dipengaruhi penurunan nilai produksi perikanan sebesar 6,21 % yaitu nilai produksi budidaya sebesar 16,37 %. Penyebab turunnya nilai produksi budidaya adalah turunnya nilai produksi rumput laut sebesar 29,35 %. Hal ini disebabkan karena harga rumput laut dipengaruhi oleh harga pasar dan permintaan negara tujuan ekspor.**



Salah satu yang mempengaruhi nilai produksi adalah permintaan ekspor karena produk perikanan Sulawesi Selatan merupakan produk ekspor terutama komoditi rumput laut. Berdasarkan tabel 10, volume ekspor perikanan meningkat 5,18% namun nilai ekspor perikanan turun 19,35 % yang disumbang nilai ekspor rumput laut turun 23,06 % dan nilai ekspor tuna turun 23,57 %.

Tabel 9.  
Realisasi Ekspor dan Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2018 - 2023

Uraian	Realisasi Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor perikanan (Ton)	130.623,1	166.373,2	158.416,5	179.019,0	191.325,3	201.235,70
Rumput laut	105.760	140.420,1	134.818,7	152.276,8	165.000,7	179.755,1
Udang	4.462	7.098,1	8.107,4	9.093,1	8.392,5	Belum ada data
Tuna Cakalang Tongkol	2.455	2.915,4	2.474,6	1.880,1	3.305,9	2.567,5
Ikan lainnya	17.946	15.939,6	12.578,5	15.769,0	14.626,2	Belum ada data
Nilai Ekspor Perikanan US \$ (1000)	340.369,3	355.301,7	339.002,9	397.787,7	528.397,7	426.150,0
Rumput laut	116.105,0	160.277,9	137.661,8	164.656,0	314.307,5	241.865,9
Udang	42.871	63.968,6	75.829,1	82.272,1	75.301,2	Belum ada data
Tuna Cakalang Tongkol	20.329	27.081,6	23.292,2	17.766,8	32.814,8	25.080,09
Ikan lainnya	161.064,3	103.973,6	101.491,3	96.345,5	105.974,2	Belum ada data

**Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB adalah meningkatkan produktivitas (volume dan nilai) perikanan . Peningkatan produktivitas perikanan tangkap di laut dengan strukturisasi armada kapal > 10 GT, kapal 5 GT, dan bagan**

rambo, Strukturisasi alat tangkap berupa alat bantu penangkapan ikan, alat tangkap ramah lingkungan (jaring purse seine, jaring gillnet, alat tangkap kepiting, alat tangkap sero, mesin, rumpon), serta pengembangan pelabuhan perikanan sebagai sentra produksi. Untuk mendukung peningkatan produktivitas di PUD dengan strukturisasi alat penangkapan ikan PUD berupa bantuan alat tangkap jaring gillnet. Peningkatan produktivitas budidaya dengan bantuan bibit berkualitas, sarana prasarana budidaya, pengembangan sarana prasarana perbenihan.

Nilai PDRB perikanan dipengaruhi nilai produksi perikanan yaitu nilai produksi tangkap dan nilai produksi budidaya sebagaimana tabel 9 dibawah.

Tabel 10.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis I IKU I

Sasaran Strategis I	Meningkatnya Produksi dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas
IKU I	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan
Program	Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengelolaan perikanan tangkap
Indikator Kinerja Pembentuk	Nilai produksi budidaya Nilai Produksi tangkap

#### a. Nilai Produksi perikanan budidaya

Tabel 11.  
Capaian Kinerja Nilai produksi Budidaya

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi*	Target	Capaian	
Nilai produksi budidaya (Rp M)	13.735	14.856,34	13,785.5	15.878,28	21.712,6	18.157,93	15.958,39	113,78	-

Keterangan : \*data sementara

Nilai produksi budidaya mencapai target 113,78 % namun turun sebesar 16,37 % dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018 - 2023 nilai produksi budidaya terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 9,14 %. **Tahun 2020 mengalami penurunan akibat imbas pandemi Covid, kemudian di tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Jika dilihat dari nilai produksi komoditi budidaya yang mengalami penurunan adalah nilai produksi rumput laut turun sebesar 29,35 % dan nilai produksi bandeng sebesar 7,85 %.** Nilai produksi bandeng turun seiring dengan penurunan volume produksi sedangkan nilai produksi rumput laut disebabkan penurunan harga yaitu tahun 2022 harga rata-rata rumput laut *E Cottonii* Basah sebesar Rp 4.992 dan kering Rp 29.953 sedangkan tahun 2023 harga rata-rata rumput laut *E Cottonii* Basah Rp 3.484 dan Kering Rp 20.900.

Nilai produksi rumput laut berkontribusi sekitar 50 % terhadap total nilai produksi budidaya sehingga mempengaruhi fluktuasi nilai produksi budidaya. Sebagai salah satu komoditi ekspor, harga rumput laut sangat dipengaruhi harga permintaan pasar negara tujuan ekspor. Perlu menjadi perhatian adalah memastikan kualitas rumput laut agar mampu bersaing dengan negara produsen rumput laut lainnya. Upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan kepada pembudidaya terkait perlunya memperhatikan kualitas rumput laut mulai dari proses *onfarm* yaitu menggunakan bibit berkualitas, penanganan pasca panen rumput laut (pengeringan sampai dengan pengemasan).

#### b. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap

Tabel 12.  
Capaian Kinerja Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi*	Target	Capaian	
Nilai Hilirisasi produksi perikanan tangkap	7.987,2	8.631,3	8,678.9	10,679,9	11.812,5	13.284,55	9.210,12	144,24	-

Keterangan : \*data sementara

Nilai produksi perikanan tangkap mencapai target sebesar 144,24 % dan naik sebesar 12,46 % jika dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018 - 2023 nilai produksi tangkap terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 13,68 %. Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap seiring dengan volume produksi yang terus meningkat. Kontribusi peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dari komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Cakalang Tongkol yang nilai produksinya naik dengan peningkatan 2,90 % dan gurita naik 209 % dibandingkan tahun 2022.

## INDIKATOR 2

## PRODUKSI PERIKANAN

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan produksi garam. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut) dan produksi garam dari kabupaten/kota penghasil garam, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan. Data produksi perikanan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Prod.Kab/Kota I} + \text{Prod.Kab/Kota II} + \text{Prod.Kab/Kota III} + \dots \text{dst}$$

$$X_{\text{tot}} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$$

Tabel 13.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi*	Target	Capaian	
Produksi Perikanan (Ton)	4.022.206	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.393,56	4.536.058,18	4.735.854,65	4.759.871,9	99,41	-

Keterangan : \*data sementara

Produksi perikanan mencapai target sebesar 99,48 % dan naik 4,39 % dibandingkan tahun 2022. Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 produksi perikanan tumbuh positif dengan peningkatan rata-rata 4,22%. Tidak tercapainya target disebabkan **perlambatan peningkatan produksi budidaya yaitu sebesar 0,78 % jauh dari proyeksi perencanaan yaitu tumbuh sebesar 5 %**. Informasi diperoleh dari petugas statistik Kabupaten /Kota adalah akibat musim kemarau sehingga produksi budidaya air tawar tidak optimal akibat kurangnya pasokan air dan mempengaruhi kualitas air. Selain itu harga rumput laut yang turun mempengaruhi animo pembudidaya. Upaya yang telah dilakukan adalah penerapan teknologi budidaya yaitu teknologi bioflock. Perlunya penerapan beberapa teknologi yang adaptif, aplikatif, efektif, dan efisien karena kelebihan penerapan teknologi budidaya tersebut adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktifitas tinggi, hemat air dan ramah lingkungan.

Tabel 14.  
Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	Target 2023	Capaian (%)	Naik/Turun tahun 2022-2023
Produksi perikanan budiaya (ton)	3.568.952,6	3.662.761,4	3.713.111,8	4.081.480,5	4.095.934,7	4.128.072,6	4.298.391,1	96,04	+ 0,78
produksi perikanan tangkap (ton)	366.540,7	398.565,2	389.208,2	417.410,7	436.735,7	492.159,5	413.030,8	119,16	+ 12,93
Produksi Garam (ton)	86.712,70	140.338,87	45.310,5	1.283,15	3.387,66	114.959,88	48.450	230,27	+ 3.293,34
Total Produksi	4.022.206	4.201.665,51	4.147.630,5	4.500.174,4	4.536.058,06	4.735.190,98	4.759.871,9	99,48	+ 4,22

Keterangan : \*data sementara



Berikut program pengampuh dan indikator untuk pencapaian target sasaran II Produksi perikanan.

Tabel 15.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis I IKU II

Sasaran Strategis I	Meningkatnya Produksi dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi
IKU 2	Produksi Perikanan
Indikator Kinerja Pembentuk	Produksi perikanan budidaya
	Produksi perikanan tangkap
	Produksi garam
	Persentase ketersediaan benur berkualitas
	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan
	Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional
Program Pengampuh	Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengelolaan kelautan , pesisir dan pulau-pulau kecil

### Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya mencapai target sebesar 96,04 % dan naik 0,78 % dibandingkan tahun 2022. Perkembangan produksi budidaya tahun 2018-2023 terus meningkat dengan rata-rata 3,77 %. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4.243.467 ton telah mencapai 97,28 %. Produksi perikanan budidaya tersebut terdiri dari budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar.

Tabel 16.  
Perkembangan komoditi unggulan budidaya tahun 2018 -2023

Komoditi	Realisasi Tahun						% Peningkatan/ penurunan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	
Rumput laut	3,317,524.90	3,406,924.6	3,441.138,7	3.786,411.7	3.796.733,3	3.858.093,4	+ 1,62
Udang	46,524.0	44,520.5	50.876,1	54.974,6	61,446.2	66,723.1	+ 8,59
Udang Windu	10,169.5	10,370.2	10.595,4	11.457,5	10.662,4	8.859,0	-16,9
Bandeng	179.254,	184.186,2	193.589,2	211.225,4	206.091,4	173.040,8	-16.04

Keterangan : \*data sementara

Perlambatan peningkatan produksi budidaya disebabkan perlambatan produksi rumput laut sebesar 1,62 % dan penurunan komoditi budidaya tambak yaitu udang windu turun 0,38 % dan bandeng turun 2,89 %. Jika dilihat dari realisasi produksi per kabupaten/kota sesuai tabel 16 yang mengalami penurunan adalah Kab. Selayar, jeneponto, makassar, pangkep, Sidrap, enrekang, Soppeng dan Toraja Utara. Informasi diperoleh dari petugas statistik Kabupaten /Kota adalah akibat musim kemarau sehingga produksi budidaya air tawar tidak optimal akibat kurangnya pasokan air, mempengaruhi kualitas air sehingga menyebabkan pertumbuhan terhambat bahkan menyebabkan gagal panen, selain itu harga rumput laut yang turun mempengaruhi animo pembudidaya. Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya yaitu berkisar 93 %. Pencapaian volume produksi perikanan budidaya didukung kegiatan bantuan bibit, sarana prasarana budidaya, serta pembinaan dan pendampingan teknis secara rutin (Tenaga pendamping Budidaya ) untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal

Tabel 17.  
Realisasi produksi perikanan budidaya per kabupaten/kota tahun 2021 - 2023

No	Kabupaten	Tahun			% Peningkatan /penurunan
		2023 *	2022	2021	
1	Luwu	644.407,6	641.850,7	627,586.9	+ 0,40
2	Luwu Utara	249.050,6	240,762.5	232,620.3	+ 3,44
3	Wajo	514.297,4	509,656.9	505,573.4	+ 0,91
4	Bone	522.110,9	486,732.1	450,181.0	+ 7,27
5	Sinjai	47.208,0	43,836.4	48,174.3	+ 7,69
6	Bulukumba	214.799,0	195,758	228,920.0	+ 9,73
7	Selayar	468,0	543.4	522.8	- 13,88
8	Bantaeng	90.142,9	89,375.3	86,575.3	+ 0,86
9	Jeneponto	246.129,1	257,230.9	257,604.7	- 4,32
10	Takalar	620.488,0	596,374.7	590,272.0	+ 4,04
11	Makassar	1.528,4	1,928.9	1,506.7	- 20,77
12	Maros	29.864,9	28,404.0	27,000.7	+ 5,14
13	Pangkep	311.560,7	427,456.3	473,025.4	- 27,11
14	Barru	6.255,2	6,450.1	6,301.1	- 3,02
15	Pare Pare	66,7	62.1	40.9	+ 7,52
16	Pinrang	69.882,2	67,357.0	64,553.1	+ 3,75
17	Gowa	1.096,6	975.4	973.6	+ 12,43
18	Luwu Timur	378.992,5	318,944.6	315,590.1	+ 18,83
19	Palopo	174.735,9	176,078.6	158,518.8	- 0,76
20	Sidrap	1.216,4	1,488,3	1,350.9	- 18,27
21	Enrekang	997,2	1,848.1	1,836.0	- 46,04
22	Soppeng	378,4	444.1	436.6	- 14,79

No	Kabupaten	Tahun			% Peningkatan /penurunan
		2023 *	2022	2021	
23	Tana Toraja	796,4	750.3	692.0	+ 6,14
24	Toraja Utara	1.599,6	1,626.0	1,624.00	- 1,62
<b>Total</b>		<b>4.128.072,6</b>	<b>4.095.802,9</b>	<b>4.081.480,50</b>	<b>+0.78</b>

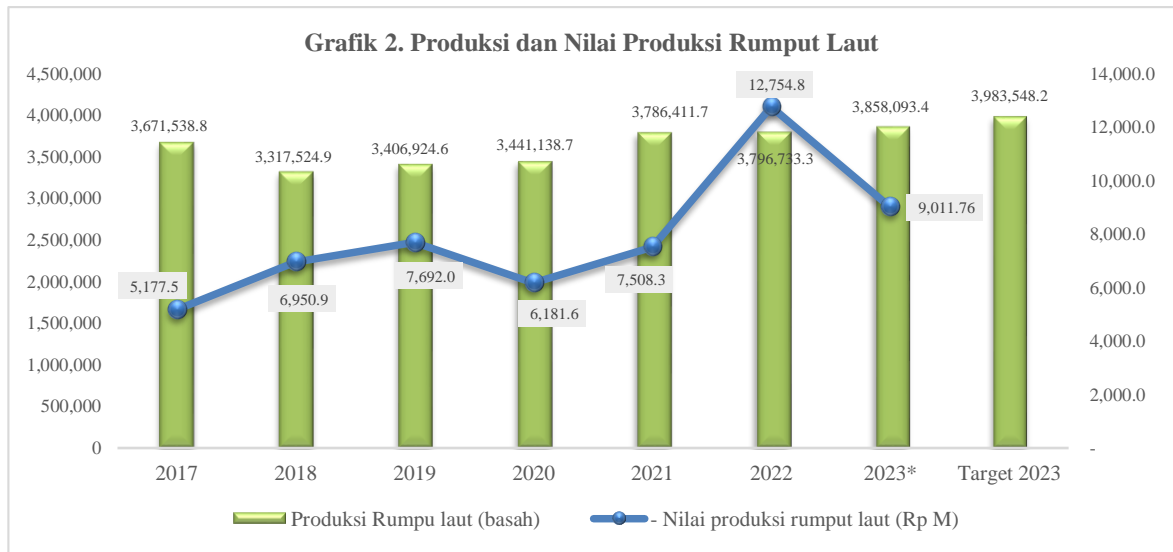
Keterangan : \*data sementara

Komoditas unggulan budidaya Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian per komoditas unggulan sebagai berikut.

#### a. Rumput Laut

Tahun 2023 produksi rumput laut naik sebesar 1,62 % dibandingkan tahun 2022 dan mencapai 96,85 % dari target yang ditetapkan sebesar 3.983.548 ton basah. Selama kurun waktu 2018-2015 Produksi budidaya rumput laut terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 3,91 %. **Berdasarkan tabel produksi rumput laut per kabupaten/kota tabel 18,** kabupaten yang mengalami penurunan produksi yaitu Kabupaten selayar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep dan Kota Palopo. Informasi yang diperoleh **produksi rumput laut kurang berkembang dan mati disebabkan salahsatunya kondisi perairan karena suhu permukaan laut yang tinggi akibat *el nino*.**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan nilai produksi rumput laut adalah bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut untuk meningkatkan produktivitas pembudidaya berupa bantuan bibit berkualitas (telah dicek untuk memastikan kualitas bibit oleh Tim Teknis Budidaya) dan tali metode tali **bentang**. Salah satu kunci keberhasilan adalah pendampingan lapangan oleh Tim Pendamping kabupaten /kota dimulai dari identifikasi kelompok penerima, proses produksi hingga pasca panen dan pelaporan.



Tahun 2024 direncanakan penggunaan pelampung ramah lingkungan dan dapat dipakai berkali untuk mendukung ekonomi biru.



Tahun 2023 Bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut sebanyak 464 paket kepada 45 kelompok tersebar di Kabupaten Luwu Timur, Kabupeten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takalar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu , Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang

Tabel 18.  
Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2018 -2022

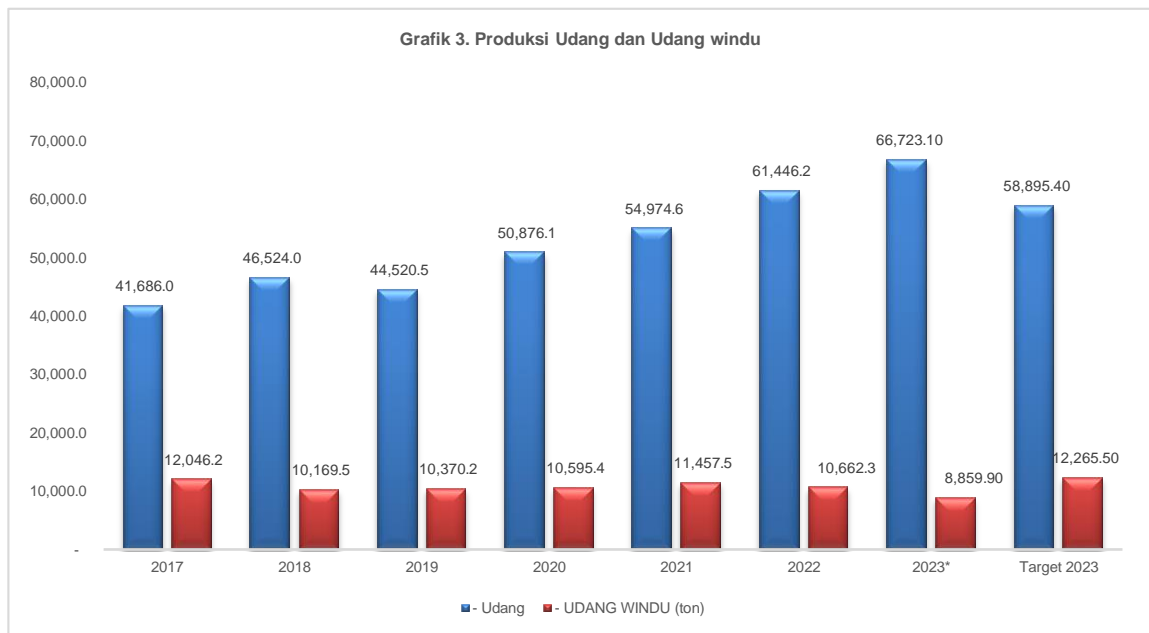
NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT						Peningkatan /Penurunan 2022-2023
		Tahun 2023*	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2018	
1	Luwu	629.532,7	627.984,2	614.258,4	612.532,2	604.420,76	598.037.33	+ 0,25
2	Luwu Utara	236.825,3	228.950,1	221.207,8	213.848,7	206.618,48	196.988.64	+ 4.44
3	Wajo	486.990,9	483.088,6	479.632,2	476.078,9	476.055,25	462.474.73	+ 0,81
4	Bone	416.464,0	366.491,0	337.592,2	286.767,2	291.686,60	275.627	+ 13,61
5	Sinjai	46.969,7	43.400,5	47.823,8	45.976,4	47.733,99	40.775.81	+ 8,22
6	Bulukumba	208.818,2	189.854,1	221.980,9	192.250,4	177.351,10	178.848.4	+ 9,99
7	Selayar	315,6	381,4	359,1	642,1	395,74	365.5	- 17,26
8	Bantaeng	89.955,9	89.164,7	86.313	66.419,0	84.805,21	84.076.788	+ 0,89
9	Jeneponto	242.042,9	252.795,5	253.389,9	231.754,4	165,036.22	193.517.76	- 4,25
10	Takalar	617.810,2	593.395,5	587.061	409.117,3	466,014.05	538.680.37	+ 4,11
11	Maros	15.827,0	14.150,0	12.870	12.360,5	12,475.00	13.240.8	+ 11,85
12	Pangkep	295,865,0	407.330	450.011	420.952,0	445,608.00	314.201.3	- 27,36
13	Barru	1,206	949,9	667.7	680	1,114.00	959	+ 26,96
14	Pare-pare	9,6	7.9	-	-	-	-	+ 21,71
14	Pinrang	36,170,7	23.641,4	19.399,1	14.243,7	16,266.30	15.448.8	+ 53,0
15	Gowa	-	-	20	-	-	-	-
15	Luwu Timur	359,531,4	299.808,5	296.267,1	298.712,0	299,067.50	294.897	+ 19,92
16	Palopo	173.858,4	175.340,0	157.558,4	123.732,4	112,276.43	109.385.91	- 0,84
TOTAL		3.858.093,4	3.796.733,3	3.796.733,3	3.441.138,7	3,406,924.64	3,317,525.14	+ 1,62

Keterangan : \*data sementara

Tahun 2020,2021 dan 2022 sulawesi Selatan peringkat I Penghasil rumput laut nasional.

### b. Udang dan Udang Windu

Produksi Komoditi unggulan udang naik 8,59 %, namun sebaliknya produksi udang windu turun 16,04 % di tahun 2022. **Peningkatan udang vannamee disumbang oleh budidaya udang intensif dan animo masyarakat yang lebih memilih membudidayakan udang vannamee karena dikenal lebih tahan penyakit.** Budidaya udang windu di dominasi budidaya tradisional atau tanpa perlakuan. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dilaksanakan Pengembangan udang windu melalui kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Udang Windu Berbasis Kawasan, tahun 2023 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena program tersebut akan di evaluasi.



Keterangan : \*data sementara

Berdasarkan data statistik, kabupaten yang mengalami penurunan produksi udang adalah windu adalah Kabupaten Pinrang, Pangkep, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu, Jeneponto, Takalar, Makassar, Barru, Sinjai, Selayar, dan Bantaeng. Informasi yang didapatkan penurunan udang windu di kab. Pinrang sebesar 61 %, salah satu yang



mempengaruhi adalah kemarau panjang, saluran dan muara mengalami pendangkalan dan benih yang digunakan rata-rata pembudidaya bukan dari hatceri atau HSRT yang bersertifikat.

Tabel 19.  
Perkembangan produksi udang windu kab/kota tahun 2018 -2022

NO	KABUPATEN	PRDOKSI UDANG WINDU TAHUN – n					
		2023	2022	2021	2020	2019	2018
1	Luwu	236,0	360,9	424,8	436,8	488,0	515,1
2	Luwu Utara	614,5	593,8	574,4	526,2	568,1	510,3
3	Wajo	271,1	213,8	146,1	97,1	96,3	94,8
4	Bone	2.867	2.240	1.887,3	897,8	877,2	843,2
5	Sinjai	3,3	6,3	16,4	62,0	63,5	8,1
6	Bulukumba	367,1	401,4	581	499,1	554,6	657,9
7	Selayar	5,9	7,2	10	9,6	9,1	7,8
8	Bantaeng	5,8	6,7	7,0	7,2	7,4	5,9
9	Jeneponto	234,7	295,5	293,6	316,9	407,0	406,5
10	Takalar	165,0	167,1	206,3	218,4	217,2	312,0
11	Makassar	17,0	84,3	199,1	319,7	367,0	272,6
12	Maros	1.951,6	1.915,3	1.857,4	1.820,5	1.772,6	1.749,5
13	Pangkep	502,0	1.038,5	1.261,7	1.046,0	1.129,0	1.183,0
14	Barro	57,7	97,4	99,6	100	122,0	120,0
15	Pinrang	1.034,6	2.652,7	2.652,7	3.621,9	3.057,4	2.874,6
16	Gowa	30,8	24,6	24,6	48,5	69,4	71,6
17	Luwu Timur	489,0	552,8	549,3	560,5	556,7	529,0
18	Palopo	5,9	4,2	7,1	7,2	7,9	7,5
TOTAL		8,859	10.662,4	11.457,5	10.595,4	10.370,2	10.169,5

Keterangan : \*data sementara

Pada tahun 2020 Sulawesi Selatan peringkat VII, tahun 2021 peringkat VI, dan 2022 peringkat IV Penghasil udang nasional.

### Persentase Ketersediaan Benur Berkualitas

Tahun 2023 persentase ketersediaan benur berkualitas terealisasi 112,58 %. Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2022 yaitu 78,51 %. Tahun 2023 target benur berkualitas sebesar 10.000.000 ekor terealisasi 11.258.000 ekor terdiri dari target bantuan 900.000 ekor (realisasi 900.000 ekor) dan penjualan PAD 9.100.000 (realisasi 10.358.000 ekor). Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan ketersediaan benur berkualitas adalah dukungan operasional (pengadaan induk berkualitas, pakan dan obat-obatan), jaminan bebas virus melalui hasil uji PCR agar dapat mejamin keberhasilan budidaya dan meningkatkan minat pembeli untuk menggunakan benur dari UPT PBAPL

Tabel 20.  
Ketersediaan Benur oleh UPT PBAPL tahun 2021 -2023

Uraian	Target (ekor)			Realisasi (ekor)			Capaian (%)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Penjualan (PAD)	20.000.000	14.500.000	9.100.000	20.834.500	9.682.000	10.358.000	104,17	66,77	113,28
Bantuan	6.500.000	7.500.000	900.000	7.280.000	7.590.000	900.00	112,0	101,2	100
Total	26.500.000	22.000.000	10.000.000	28.114.500	17.272.000	11.258.000	106,09	78,51	112,58

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah upaya dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan budidaya perikanan khususnya budidaya air payau dan laut. Ketersediaan benur berkualitas adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan UPT PBAPL dalam rangka pembinaan berupa bantuan benur dan sebagai sumber penerimaan PAD.

### Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap mencapai 119,16 % dari target dan naik 12,69 % dibandingkan capaian tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata Produksi 7,74 % kurun waktu 2018-2023. perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 448.272 ton dan perairan umum sebesar 43.887.5 ton. Komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Cakalang Tongkol naik 1,81 %, produksi gurita naik 209 %. **Upaya yang dilakukan untuk mendorong produksi perikanan tangkap adalah bantuan kepada nelayan berupa alat tangkap, alat bantu tangkap, mesin, rumpon, dan kapal serta pengembangan sarana prasarana perlabuhan perikanan sebagai sentra produksi perikanan.**



Penyediaan sarana prasarana peningkatan kapasitas nelayan kepada 70 kelompok nelayan laut berupa kapal >10 GT sebanyak 2 unit, 5 GT sebanyak 15 unit, bagan rambo 1 unit, mesin, alat tangkap dan alat bantu tangkap (jaring, pancing, purse seine, gill net, alat tangkap kepiting, alat tangkap sero dan alat bantu tangkap fish finder) dan 2 kelompok nelayan PUD berupa jaring gillnet

### Pelabuhan Memenuhi Standar Operasional

Realisasi persentase pelabuhan perikanan memenuhi standar operasional sebesar 89,47 % meningkat dibandingkan tahun 2022 terealisasi 68,42 %. Persentase pelabuhan perikanan sesuai standar operasional jika memenuhi minimal 3 standar operasional yaitu

telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Dari total 19 pelabuhan perikanan, yang memenuhi standar operasional sebanyak 17 pelabuhan.

Gambar 1.  
Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional tahun 2022

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	KABUPATEN/KOTA	PELABUHAN PERIKANAN MEMENUHI STANDAR OPERASIONAL SESUAI IKK LPPD PERMENDAGRI 28 TAHUN 2020					
			Telah operasional	Penetapan kelas oleh MKP	Memiliki Kelembagaan	Memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran	Menyusun WKOPP	Menerapkan CPIB
PELABUHAN WILAYAH II								
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	√	√	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	√	X	√	X	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Kab. Gowa	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	√	√	√	√	X	X
PELABUHAN WILAYAH I								
1	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	X	X	√	X	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Pare-pare	√	X	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	√	X	√	√	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	√	X	√	√	X	X
10	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	√	X	√	√	X	X

Faktor pendorong keberhasilan adalah alokasi anggaran penyediaan sarana prasarana pelabuhan untuk mendukung operasional pelabuhan dan Penetapan SK Kasatpel dan SK syahbandar untuk optimalisasi pelayanan di pelabuhan. Dua pelabuhan tidak memenuhi standar operasional yaitu pelabuhan perikanan Polejiwa Kab. Barru karena kondisi PP Polejiwa sejak dibangun oleh kabupaten tidak operasional karena dibangun di lokasi yang bukan aktifitas nelayan dan PP Tanrusampe Kab. Jeneponto Armada yang beroperasi adalah kapal dibawah 5 GT yang tidak membutuhkan dokumen kesyahbandaran sehingga tidak ada penempatan syahbandar/petugas syahbandar. Terkait 2 pelabuhan

tersebut perlu dibuat pertimbangan teknis terkait pengembangan pelabuhan kedepan .Pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 2023 jumlah sarana prasarana yang terbangun di Pelabuhan Perikanan dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 21.  
Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Tahun 2019-2022

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
2	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
3	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020) , pemasangan instalasi listrik (2023)
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	Rehab TPI (2021) , rahab gedung TPI (2022), Tempat pembuangan sampah (2023), rehab gedung kantor PPI (2023)
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehabilitasi Kantor 120 Meter PPI Cempae (2021)
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	Jalan Kompleks PPI Lonrae 312.5 Meter (2020) Rehab Kantor UPT Pelabuhan wil 1 (2021) , rehab TPI (2022), Jalan kompleks PPI (2022)
7	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	Jaringan instalasi listrik PPI (2021) Turap penahan tanah di PPI (2021) Fasilitas air (tawar) bersih (2021)
8	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	Pengadaan air bersih (2019)
9	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Lappa(2021) , Rehab TPI (2023)

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
10	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	Rehabilitasi pelataran PPI Kajang (2019), Jaringan listrik PPI Kajang (2020), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
11	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	jaringan instalasi listrik PPI Bontobahari (2019), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Bontobahari(2022), Rehab TPI (2023)
12	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehab Wisma Nelayan dan Penataan Lingkungan PPI Birea (2021) Rehab drainase (2023), Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk travo (2023)
13	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	Penataan PPI Beba(2019), sarana operasional kesyahbandaran (2022), rahab TPI (2022). jaringan dan instalasi listrik (2022), Penyusunan Andalalin (2023), dokumen UKL UPL (2023), pembangunan IPAL (2023) , Breakwater (2023), Fasilitasi air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar, menara dan tank (fisik tidak selesai 46 %) (2023), Rehab drainase (2023)
14.	Pelabuhan perikanan Bontobahari	Kab. Maros	Rehab TPI (2023)
15	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	Pembuatan pagar (2023)

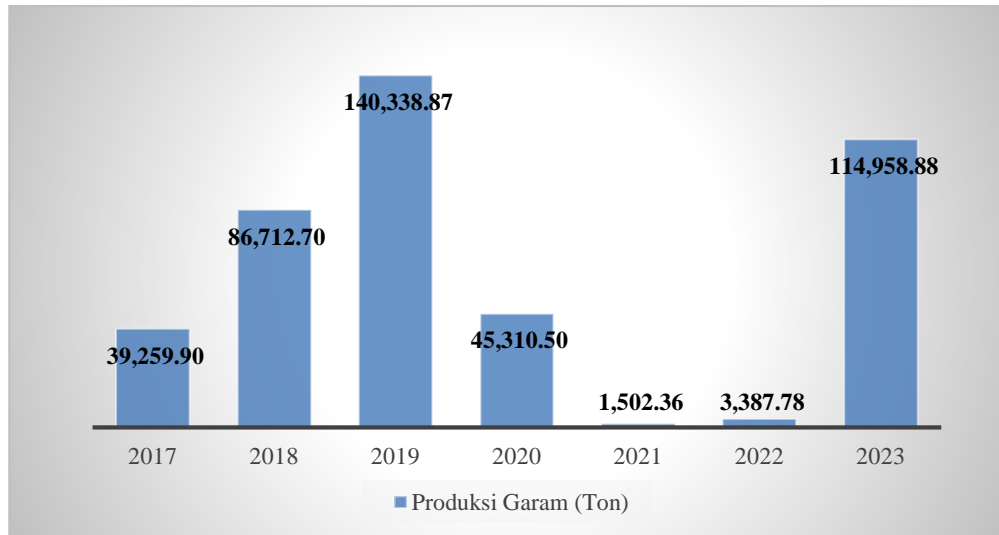
### Produksi garam

Produksi garam mencapai target sebesar 230,39 % dan naik 3.194,86 % diandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018-2023 produksi garam rakyat sangat fluktuatif dimana produksi tertinggi di tahun 2019 sebesar 140.338,87 ton dan terendah di tahun 2021 yaitu 1.502,36 ton. Hal ini disebabkan karena produksi garam rakyat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Tahun 2023 peningkatan produksi garam didukung faktor cuaca yaitu musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2023 dimulai bulan maret dan puncak produksi dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.



**Upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi produksi garam yaitu geomembran untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam. Rapat koordinasi percepatan pengembangan garam bersama kemenomarves sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, pembinaan KUGAR terkait upaya peningkatan produksi garam di kabupaten dalam mendukung stok garam nasional. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah Tahun 2020-2024 yang sedang tahap proses penetapan pergub sebagai tindak lanjut Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Melalui APBN dilaksanakan penyusunan DED SEGAR (Sentra Ekonomi Garam).**

Grafik 4. Produksi Garam



Keterangan : \*data sementara

Untuk mendorong capaian produksi Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 telah dibangun sarana prasarana usaha garam berupa gudang garam 16 unit, sarana iodisasi (mesin iodisasi garam) 3 unit, geomembran 11 paket dan mesin pompa 7 unit sesuai kebutuhan kelompok usaha garam.

Kondisi gudang garam tradisional yang yang tidak sesuai standar bahkan sudah lapuk dan tidak layak lagi untuk menyimpan atau menampung garam hasil panen pada musim kemarau maupun musim penghujan. Dengan adanya pembangunan gudang garam rakyat menjaga harga garam tetap stabil disaat stok garam melimpah. Selain itu upaya revitalisasi gudang garam rakyat sesuai dengan





spesifikasi gudang tipe C pada SNI 8446:2017 untuk tetap mempertahankan kualitas garam yang tersimpan.



Tahun 2022 gudang garam belum termanfaatkan optimal karena produksi garam yang rendah



Tahun 2023 gudang garam termanfaatkan menampung produksi garam petani bahkan telah melampaui kapasitas tampung gudang garam

Tahun 2022 sarana iodisasi garam adalah sarana untuk membantu proses penambahan zat iodium berupa senyawa kalium iodat ( $KIO_3$ ) atau kalium iodida dengan kadar 30-80 ppm kedalam garam secara mekanis. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan harga jual sehingga pendapatan petani garam lebih baik.





Sarana geomembran sebagai alas tambak garam mampu mempercepat kristalisasi garam sehingga panen lebih cepat dilakukan, garam lebih putih karena tidak tercampur dengan tanah

### Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan mencapai 61,62 % dari taret yang ditetapkan tahun 2023 yaitu terealisasi 61 unit dari target 99 unit sampai dengan akhir tahun RPJMD. Sarana prasarana produksi tersebut terdiri dari tambatan perahu sebanyak 20 unit (5 unit pesisir dan 15 unit di pulau-pulau kecil), sarana prasarana garam 41 unit berupa gudang garam, geomembran, sarana iodisasi, pompa air dan tunnel. Kendala yang dihadapi pemenuhan sarana prasarana mendukung produksi perikanan tambatan perahu adalah kesesuaian lokasi yang dipersyaratkan, kesesuaian spesifikasi tambatan perahu, ketersediaan anggaran akibat refocusing anggaran di tahun 2020 dan ketersediaan SPD (surat penyediaan dana) tahun 2023 sehingga alokasi tambatan perahu dan sarpras garam tidak terlaksana. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana adalah koordinasi dan verifikasi awal ke lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi dan spesifikasi serta dukungan anggaran untuk pencapaian target.

Tabel 22.  
Sarana prasarana mendukung produksi perikanan 2019 -2022

Indikator	Target					Realisasi					Capain RPJMD
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Cakupan ketersediaan sarana prasarana pendukung produksi perikanan	20	40	50,17	74,08	100	7,27	9,09	33,33	50,51	61,62	61,62

Sarana prasarana pendukung produksi perikanan berupa tambatan perahu yang dibangun untuk memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang dan mempermudah naik turunnya nelayan. Kurun waktu 2019-2023 telah terbangun 18 unit tambatan perahu.



Desa Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu



Pulau Polewali Desa Mattiro Labangeng Kec.  
Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep



Sarana pendukung produksi lainnya adalah sarana prasarana garam seperti gudang garam , geomembran dan sarana iodisasi kurun waktu tahun 2019 - 2022 terealisasi 27 unit. (sarana prasarana garam telah dijelaskan di indikator sebelumnya)

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran II**

Sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi dapat dicapai melalui **Tiga Program yaitu :**

1) **Program pengelolaan perikanan budidaya** terdiri dari kegiatan :

- a) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dilaksanakan bantuan sarana prasarana rumput laut 464 paket, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan



Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah di 8 lokasi, produksi benur yang berkualitas target 10.000.000 ton realisasi 11.258.000 ekor.

- b) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di perairan darat dilaksanakan penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Air Tawar yaitu bioflock 10 unit, Prasarana perbenihan UPT PBAPL berupa pembangunan tandon air. Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Tawar berupa sarana operasional Instalasi Pengembangan Ikan Air Tawar (IPIAT) Lajoa Soppeng untuk menghasilkan benih ikan air tawar ikan mas dan ikan nila, sarana pendukung operasional perbenihan UPT PBAPL target produksi benur 10.000.000 ekor terealisasi 11.258.000 ekor .

Upaya mendukung ketahanan pangan dan pencegah stunting melalui penyediaan protein hewani bagi masyarakat dilaksanakan penerapan teknologi budidaya bioflock



## 2) Program pengelolaan perikanan tangkap terdiri dari kegiatan :

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil dilaksanakan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap berupa Bantuan prasarana penangkapan ikan kapal > 10 GT 2 unit, kapal 5 GT 15 unit, bagan rambo 1 unit
- b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dilaksanakan Bantuan sarana penangkapan ikan berupa alat bantu penangkapan ikan 31 unit, alat tangkap jaring purse seine 3 paket, jaring gillnet 18 paket, alat tangkap

kepiting 14.667 buah, alat tangkap sero 9 unit, bantuan mesin 25 unit, rumpon 26 paket.

- c) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD yaitu Untuk mendukung peningkatan produktivitas di PUD dengan strukturisasi alat penangkapan ikan PUD berupa bantuan alat tangkap jaring gillnet
- d) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yaitu rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT sebanyak 484 rekomendasi
- e) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dilaksanakan Pengembangan sentra produksi perikanan pelabuhan perikanan berupa : 1) penyediaan sarana dan prasarana mendukung fungsi pelabuhan di tahun 2023 yaitu PPI Polejiwa Kab. Barru, PPI beba kab. takalar, PPI bontobahari Kab. Bulukumba, PPI Lonrae Kab. Bone, PPI Sumpang Binange Kab. Barru, PPI Lappa Kab. Sinjai, PPI Maccini Baji Kab. Pangkep dan PPI Bontobahari Marios, 2) Temu koordinasi pengembangan pelabuhan perikanan untuk mendapatkan informasi kebutuhan sarana prasaran pelabuhan dalam rangka pengembangan pelabuhan perikanan, 3) pelaksanaan Layanan kesyahbandaran . Upaya tersebut untuk memperlancar operasi penangkapan, pendaratan hasil perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan, optimalisasi pendataan produksi perikanan di pelabuhan sebagai sentra produksi perikanan untuk mendukung fungsi pelabuhan yaitu fungsi pemerintahan dan pengusaha.

3) Program pengelolaan kelautan , pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari kegiatan :

- a) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan untuk mendorong peningkatan produksi garam Rapat koordinasi percepatan

pengembangan garam bersama kemenomarves sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, pembinaan KUGAR terkait upaya peningkatan produksi garam di kabupaten dalam mendukung stok garam nasional . Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah Tahun 2020-2024 yang sedang tahap proses penetapan pergub sebagai tindak lanjut Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Melalui APBN dilaksanakan penyusunan DED SEGAR (Sentra Ekonomi Garam).

- b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa sarana prasarana pendukung produksi perikanan terdiri dari sarana prasarana garam (geomembran, mesin pompa) dan tambatan perahu untuk mendukung aktivitas perikanan dan/atau peningkatan ekonomi bagi masyarakat pesisir.



### **SASARAN : Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan diukur dengan indikator konsumsi ikan.

Tabel 23..

Capaian Sasaran Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/Kap/tahun)*	65,9	71,10	107,89
Rata-rata capaian Sasaran Startegis				107,89

Keterangan : \*data sementara



## INDIKATOR

## KONSUMSI IKAN

Formulasi untuk mengukur konsumsi ikan menggunakan formulasi sebagai berikut

:

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(\text{total produksi} - \text{produksi bukan bahan makanan}) - \text{ekspor} - 7\%}{(\text{jumlah penduduk 2022} + \text{jumlah penduduk 2023} / 2)}$$

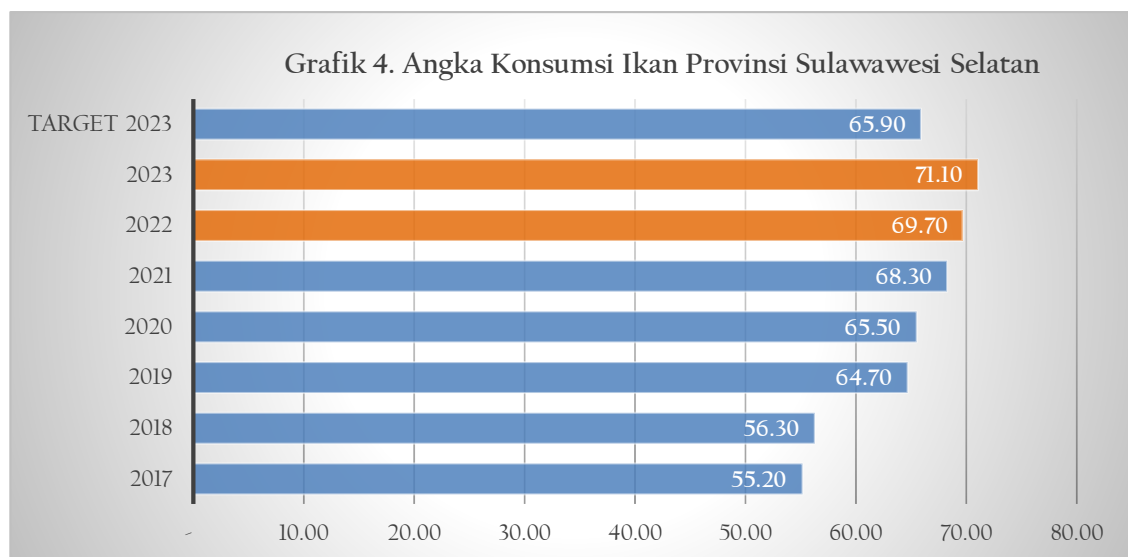
Keterangan : 7 % adalah data produk diantarpulau yang tak terhitung (range 0 – 15 %)

Tabel 24.  
Capaian Kinerja indikator sasaran Konsumsi Ikan Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi*	Target	Capaian	
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	56.3	64.7	65.5	68,3	69,5	71,10	65,9	107,89	78,06

Keterangan : \*data sementara

Nilai sementara Konsumsi ikan diperkirakan sebesar 71,1 % mencapai target sebesar 107,89 % dan naik 2,01 % dibandingkan tahun 2022. kurun waktu 2018-2023 angka konsumsi ikan terus naik dengan peningkatan rata-rata sebesar 6,12 %. Jika dibandingkan dengan target konsumsi ikan nasional sebesar 78.06 kg/kap/tahun capaian angka konsumsi ikan Sulawesi Selatan telah mencapai 91.08 %. **Faktor pendukung tingginya angka konsumsi ikan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang mengonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi. Hal ini di dukung dengan pencapaian produksi perikanan tangkap, produksi budidaya dan peningkatan produksi olahan ikan konsumsi.**



Indikator kinerja pembentuk konsumsi ikan sebagaimana tabel 24.

Tabel 25.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis II IKU 3

Sasaran Strategis II	Meningkatnya Konsumsi Ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan
IKU 3	Angka Konsumsi Ikan
Indikator Kinerja Pembentuk	Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi
	Nilai Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi
	Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan
Program Pengampuh	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

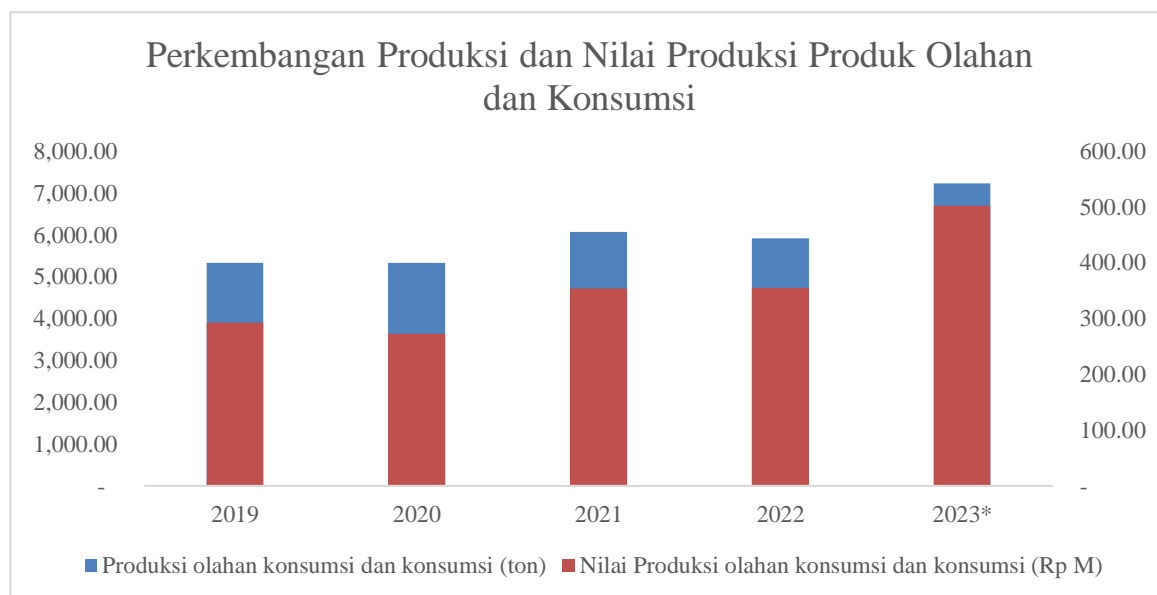
### a. Produksi dan nilai produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi

Tabel 26.  
Realisasi Indikator kinerja Produksi dan Nilai produksi Olahan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023*	Target 2023 (Akhir RPJMD)	Capaian
Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp M)	293,12	272,24	353,57	355,05	502,56	317,28	158,40
Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Ton)	5.332,1	5.235,6	6.064,47	5.911,6	7.235,83	5.544,10	130,51

Keterangan : \*data sementara

Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi mencapai target 130.51 % meningkat 22,40 % dibandingkan tahun 2022. dengan peningkatan rata-rata tahun 2019-2023 sebesar 11,21 %. Produk olahan yang meningkat adalah jenis olahan penggaraman/pengeringan ikan didukung tersedianya bahan baku dan minat pembeli yang tinggi akan produk tersebut.



Keterangan : \*data sementara

Upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah melakukan promosi produk melalui pameran diharapkan dapat menstimulasi perkembangan dan peningkatan produksi olahan. Jumlah UPI tersebar di 24 Kabupaten /Kota sebanyak yang bergerak di fermentasi ikan, pelumatan daging /surimi, pembekuan ikan, pemindangan ikan, penanganan produk segar dan dingin, pengalengan ikan, pegasapan ikan, penggaraman ikan, pengolahan lainnya, serta pereduksian dan ekstraksi.



Pembinaan UPI dalam rangka penerbitan Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar. Tahun 2021 jumlah UPI ber SKP adalah 98 UPI dan tahun 2022 sebanyak 91 UPI dan 2023 sebanyak 108 UPI. Manfaat SKP memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi, memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan (SNI untuk produk yang diperdagangkan di pasar dalam negeri atau standar negara buyer untuk produk yang diekspor) hingga memperluas pasar sehingga omzet meningkat.



Tabel 27.  
Jumlah UPI, UPI ber SKP dan SKP terbit

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Total UPI	1,126	1,190	1,425	1,565	1,543
Jumlah UPI Bersertifikat	97	56	98	91	108
SKP terbit (lembar)	268	158	352	199	320

Catatan : SKP terbit per 2 tahun sehingga yang terbit pada tahun ganjil 2021 kemungkinan besar mengajukan di tahun 2021

#### b. Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan

Tabel 28.  
Realisasi Indikator kinerja Persentase Pengujian Pembinaan Mutu Produk Perikanan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023 (Akhir RPJMD)	Capaian
Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	*	*	54,08	76,05	97,40	100	97,40

UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan.

Tabel 29.  
Capaian indikator program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Uraian	Tahun				
	Kondisi awal 2019	2020	2021	2022	2023
Target sertifikat pengujian dan pembinaan mutu produk perikanan sampai dengan akhir RPJMD	7500	7500	7500	7500	7500
Realisasi	1818	3412	4524	1123	1423
<b>Capaian (%)</b>	<b>24,24</b>	<b>45,49</b>	<b>60,32</b>	<b>76,65</b>	<b>97,40</b>

Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan mencapai target sebesar 97,40 % dan naik 27.07 % dibandingkan tahun 2022. Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2023 disebabkan adanya perlambatan kinerja di tahun 2021 karena dampak kondisi pandemi covid. UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan.



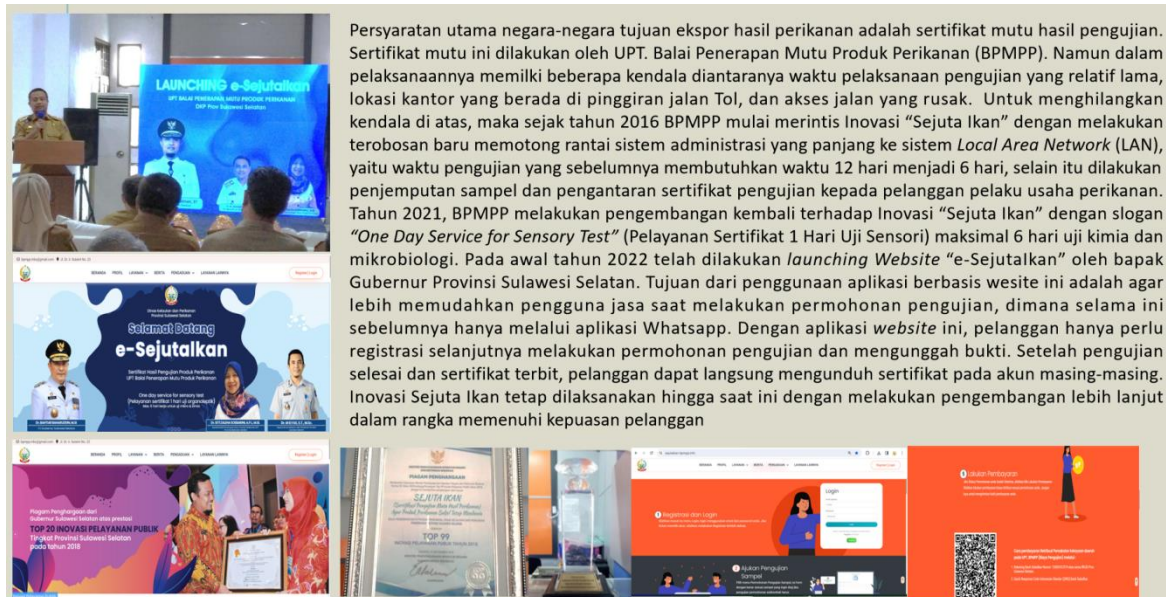
Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP) merupakan salah satu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) milik pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. LSPro BPMPP terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 2017 dan mampu mempertahankan status Akreditasinya hingga sekarang sebagai lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi, LSPro BPMPP memiliki wewenang untuk memeriksa dan menentukan standar mutu suatu produk utamanya produk hasil perikanan, yang menyediakan layanan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan Sertifikat Kesesuaian Penggunaan Tanda SNI (SKPT SNI) kepada klien. Adapun ruang lingkup produk yang terakreditasi sebagai berikut :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Fillet Ikan Beku   | 7. Siomay Ikan                              |
| 2. Bandeng Cabut Duri | 8. Abon Ikan                                |
| 3. Otak – Otak Ikan   | 9. Udang Kupas Mentah Beku                  |
| 4. Bakso Ikan         | 10. Tuna dalam kemasan kaleng               |
| 5. Amplang Ikan       | 11. Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng |
| 6. Nugget Ikan        |   |

LSPro BPMPP telah memiliki 9 klien dan telah menerbitkan SPPT SNI sebanyak 8 Sertifikat dan SKPT SNI sebanyak 13 Sertifikat. Produk perikanan yang berSNI diharapkan menjadi kebutuhan dan pilihan masyarakat luas sehingga masyarakat Indonesia Bangga Menggunakan SNI.

UPT BPMPP menghadirkan **Inovasi Sejuta Ikan yang memudahkan** **pengurusan pelayanan Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan** bagi eksportir **ikan di Sulawesi Selatan dan menjadikan layanan menjadi cepat, ringkas, hemat, dan mudah.** Upaya Pelayanan pengujian mutu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan permintaan standar negara tujuan menjadi enam hari kerja yang sebelumnya 12 hari kerja. Sistem memangkas waktu pelayanan administrasi dan penerbitan sertifikat di persingkat. Bahkan, petugas UPT BPMPP menyediakan layanan jemput sampel dan antar sertifikat tanpa tambahan biaya (gratis) serta menyiapkan layanan pengaduan pengguna jasa.





Persyaratan utama negara-negara tujuan ekspor hasil perikanan adalah sertifikat mutu hasil pengujian. Sertifikat mutu ini dilakukan oleh UPT. Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP). Namun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala diantaranya waktu pelaksanaan pengujian yang relatif lama, lokasi kantor yang berada di pinggiran jalan Tol, dan akses jalan yang rusak. Untuk menghilangkan kendala di atas, maka sejak tahun 2016 BPMPP mulai merintis Inovasi “Sejuta Ikan” dengan melakukan terobosan baru memotong rantai sistem administrasi yang panjang ke sistem *Local Area Network* (LAN), yaitu waktu pengujian yang sebelumnya membutuhkan waktu 12 hari menjadi 6 hari, selain itu dilakukan penjemputan sampel dan pengantaran sertifikat pengujian kepada pelanggan pelaku usaha perikanan. Tahun 2021, BPMPP melakukan pengembangan kembali terhadap Inovasi “Sejuta Ikan” dengan slogan “*One Day Service for Sensory Test*” (Pelayanan Sertifikat 1 Hari Uji Sensori) maksimal 6 hari uji kimia dan mikrobiologi. Pada awal tahun 2022 telah dilakukan *launching Website* “e-Sejutalkan” oleh bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penggunaan aplikasi berbasis website ini adalah agar lebih memudahkan pengguna jasa saat melakukan permohonan pengujian, dimana selama ini sebelumnya hanya melalui aplikasi Whatsapp. Dengan aplikasi *website* ini, pelanggan hanya perlu registrasi selanjutnya melakukan permohonan pengujian dan mengunggah bukti. Setelah pengujian selesai dan sertifikat terbit, pelanggan dapat langsung mengunduh sertifikat pada akun masing-masing. Inovasi Sejuta Ikan tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan melakukan pengembangan lebih lanjut dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan



Layanan pengujian sampel di Laboratorium di UPT BPMPP mendukung Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Akreditasi ISO/IEC 17025:2017)

### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran III

Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. terdiri dari kegiatan :



- 1) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dilaksanakan Kegiatan untuk meningkatkan konsumsi ikan 1) Lomba masak serba ikan (LMSI) yang dilaksanakan sebagai rangkaian Peringatan Hari Ikan Nasional bertujuan untuk agar ibu-ibu kreatif dalam mengolah ikan sebagai menu keluarga terdiri dari menu kudapan, menu balita dan menu keluarga melibatkan kader PKK dengan tujuan agar dapat tersosialisasi ke ibu PKK tingkat kec/kab/kota 2)



Penyediaan sarana prasarana pemasaran cool box ke kelompok pemasar untuk menjaga mutu ikan/ tempat penyimpanan bahan ikan untuk menjaga ketahanan mutu ikan, 3) Pengujian mutu produk perikanan untuk mendukung layanan sertifikasi hasil uji bagi perusahaan perikanan yang melakukan ekspor hasil perikanan, 4) Temu Diversifikasi produk hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha UKM untuk menghasilkan berbagai macam produk yang meningkatkan nilai produk sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha skala UKM, 5) pembinaan penerapan prosedur mutu dalam rangka penerbitan SKP (surat kelayakan pengolahan)



bagi UPI yang menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP).





## SASARAN : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan satu indikator yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Tabel 30.

Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,19	111,49	108,04
Rata-rata capaian Sasaran Strategis				108,04

## INDIKATOR 4.I

## NILAI TUKAR NELAYAN

Nilai Tular Nelayan atau NTN digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan. Data NTN bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{\text{Indeks yang diterima nelayan (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar nelayan (Ib)}}$$

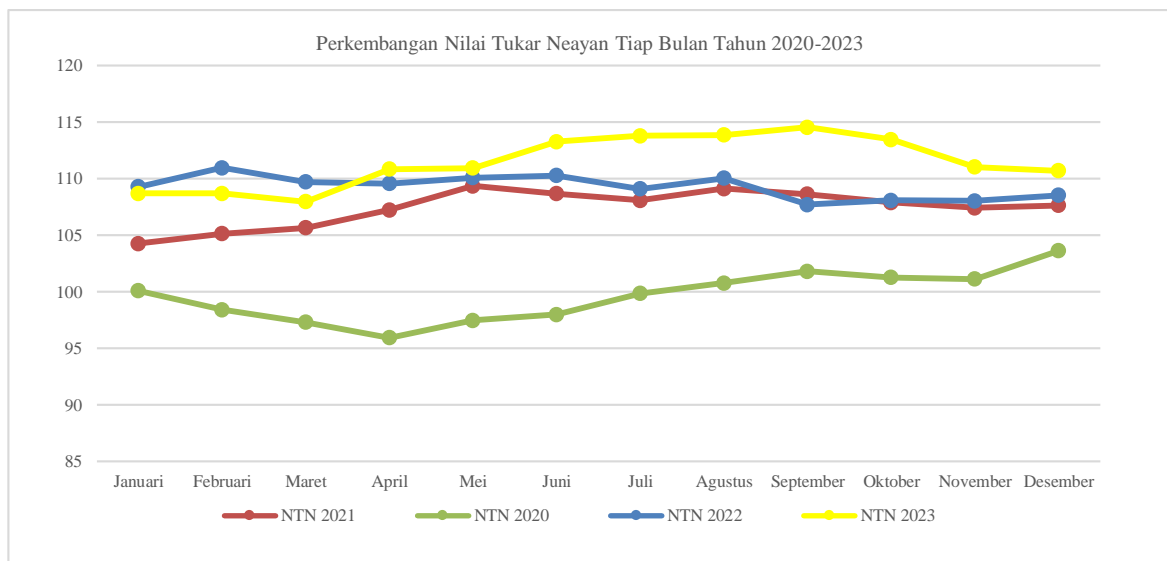
Tabel 31.  
Capaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Target	Capaian	
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107,8	107,6	99,64	107,43	109,29	111,49	103,19	108,04	-

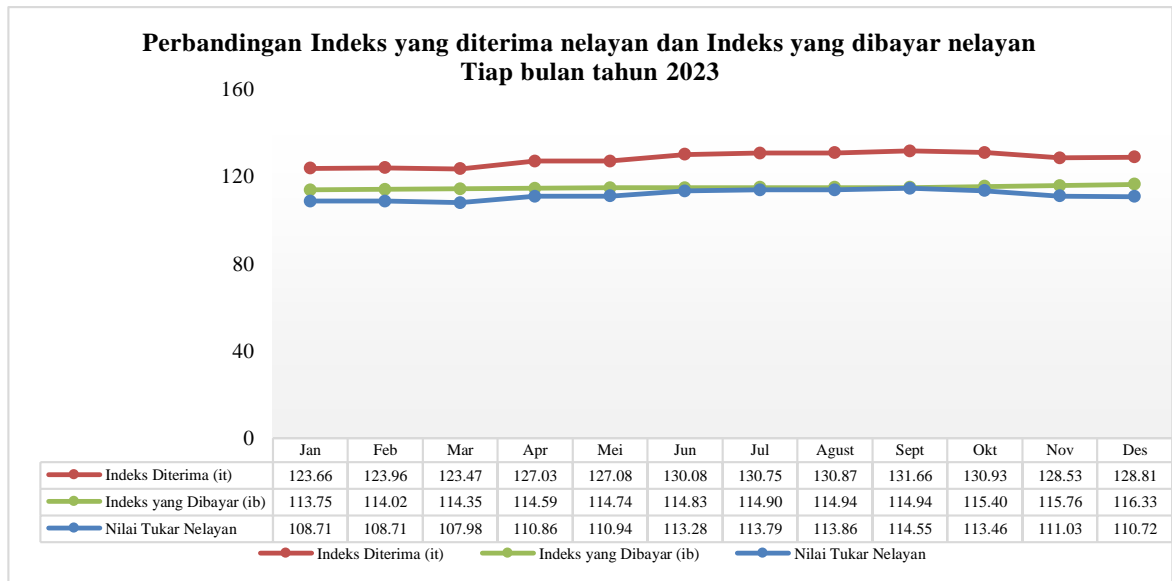
Nilai tukar nelayan terealisasi 111.49 mencapai target 108.04 % dan naik 4,32 % dibandingkan tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,99 % kurun waktu 2018-2023 sebesar dengan capain tertinggi NTN di tahun 2023 111,49 dan terendah di tahun 2020 sebesar 99,64. **Peningkatan NTN menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan sejalan dengan peningkatan produksi.** NTN menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu.



Kurun waktu tahun 2017-2023 realisasi NTN tahun 2023 merupakan capaian tertinggi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan semakin membaik.



Jika dilihat trend NTN tiap bulan setiap tahun, tren peningkatan maupun penurunan tidak tetap hal ini menunjukkan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi



Kurun waktu bulan januari - Desember tahun 2023 rata-rata indeks yang diterima nelayan (*it*) sebesar 128,07 dimana *it* diatas rata-rata dibulan Juni- Desember sedangkan rata-rata indeks yang dibayar nelayan (*ib*) sebesar 114,88 dimana *ib* diatas rata-rata di bulan Juli-Desember . Kecenderungan variasi NTN ini terjadi karena pengeluaran konsumsi yang tidak tetap, juga pendapatan usaha perikanan tangkap yang kurang menentu karena dipengaruhi oleh hasil tangkapan, musim penangkapan, dan harga ikan hasil tangkapan. **Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan nelayan adalah peningkatan kapasitas penangkapan armada kapal, alat tangkap dan alat bantu tangkap seperti fish finder untuk mengefisiensikan biaya operasional.**



Tabel 32.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis III IKU 4

Sasaran Strategis III	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
IKU 4	Nilai tukar nelayan
Indikator Kinerja Pembentuk	Cakupan bina kelompok nelayan
	Persentase produksi kelompok nelayan
Program Pengampuh	Program penngelolaan perikanan tangkap

#### a. Cakupan Bina kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan adalah jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan/bantuan pemerintah dibandingkan jumlah kelompok nelayan yang terdata  
Formulasi Cakupan bina kelompok nelayan adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah kelompok mendapatkan bantuan pemda tahun } n}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100$$

Tabel 33.  
Cakupan Bina Kelompok Nelayan tahun 2017 – 2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n (kelompok)	78	50	55	21	60	86	72
Jumlah Kelompok Nelayan (kelompok)	308	311	314	314	314	314	314
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	25,32	16,08	17,52	6,68	19,11	27,39	22,93
Target	-	-	-	-	23,89	27,07	30,25
Capaian	-	-	-	-	79,98	101,18	75,80

Cakupan bina kelompok nelayan terealisasi sebesar 22,93 % atau mencapai 75,80 %. Realisasi kelompok nelayan tahun 2022 sebanyak 86 (mendapatkan bantuan 67 kelompok dan pembinaan/bimbingan teknis 19 kelompok) turun menjadi 72 kelompok (mendapatkan bantuan sarpras) di tahun 2023. **Penurunan kelompok yang dibina disebabkan** kegiatan pembinaan/bimbingan teknis penangkapan dan penanganan ikan tidak terlaksana karena di refocusing mengingat keterlambatan penyelesaian pekerjaan sarana prasarana

#### b. persentase produksi perikanan kelompok nelayan

Tabel 34. Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Target 2023	Capaian (%)
	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	*	*	18,11	29,43	34,69	27,17	127,68

Data Realisasi persentase produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 34,69 % atau mencapai 127,68 % dari target. Persentase produksi kelompok nelayan mencapai target 127,68 % dan naik 17,8 % dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan di tahun 2023 sebanyak 72 kelompok lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 yaitu 67 kelompok. Selain itu produktivitas sarana yang diberikan juga lebih besar yaitu kapal 5 GT sebanyak 15 unit, kapal 10 GT sebanyak 2 unit, bagan rambo 1 unit.



**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program Program pengelolaan perikanan tangkap kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana prasaran usaha perikanan tangkap sebagaimana telah dijelaskan pada analissi program /kegiatan yang menunjang dan keberhasilan pencapaian sasaran II sebelumnya.



## SASARAN : Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan 3 indikator yaitu : (1) rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, (2) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, (3) persentase penurunan tindakan IUU Fishing.

Tabel 35.  
Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,09	1,34	123,34
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)*	42,44	66,17	155,92
	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing (%)	35,71	23,08	64,62
Rata-rata capaian Sasaran Strategis				114,63

INDIKATOR	RASIO KAWASAN LINDUNG PERAIRAN TERHADAP TOTAL LUAS PERAIRAN TERITORIAL
-----------	--

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2016 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penghitungan realisasi dilakukan dengan **menjumlahkan total luas kawasan konservasi yang telah /proses SK Menteri Kelautan dan Perikanan** . Formulasi untuk mengukur rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial adalah :

$$\text{Rasio kawasan lindung perairan} = \frac{\text{Luas kawasan lindung perairan}}{(\text{Total luas perairan teritorial yaitu } 43.047.900 \text{ Ha})}$$

Tabel 36.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Target	Capaian	
Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,01	1,56	1,57	1,57	1,34	1,34	1,07	123,34	-

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial sebesar 1,34 % mencapai target sebesar 123,24 %. Faktor yang menyebabkan adalah perubahan luasan kawasan konservasi daerah yaitu 1.001.953,71 ha disesuaikan dengan luas kawasan konservasi daerah berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Selatan yaitu 849.969,66 Ha.

Tabel 37.  
Realisasi Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial  
Tahun 2018 - 2022

Bidang/Urusan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan lindung perairan (Ha)	674.108,8	674.120,8	674.174,1	674.252,62	578.659,1	578.743,88
Total Luas perairan teritorial (Ha)	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900
<b>Rasio Kawasan Lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)</b>	<b>1,56</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>

Adanya perubahan data base line Luas Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) yang semula 674.105,8 Ha menjadi 820.886,83 Ha. Perubahan tersebut didasarkan data Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan sesuai **Peraturan Daerah No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 - 2041**.

Upaya yang dilakukan adalah penetapan kawasan konservasi melalui SK Menteri agar kawasan konservasi dapat dikelola secara efektif. Tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan SK menteri selanjutnya perlu menunjuk satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan, menyusun dan menetapkan dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi serta melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan. selain itu, upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rusak yaitu rehabilitasi mangrove dan terumbu karang sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL) yakni kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dan Pulih Kembali.

Capaian indikator sasaran strategis Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial indikator pembentuknya yaitu capaian program

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator **Cakupan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan**

Tabel 38.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis IV IKU 4

Sasaran Strategis IV	Meningkatnya Kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
IKU 5	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial
Indikator Kinerja Pembentuk	Cakupan Luas kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan
Program	Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

**a. Cakupan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan**

Terdapat 13 kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 - 2041 sebagaimana tabel 37 dibawah. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 2 kawasan yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri KKP dan 3 kawasan sedang proses penetapan Menteri KKP RI. Sehingga luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 820.886,83 Ha.

Tabel 39.  
Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola dan Daerah Perlindungan Laut

No	Pentapana KKPD (Data Base Line Awal)	Luas (Ha)	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Luas Kawasan Konservasi berdasarkan SK Menteri KKP	Keterangan
	<b>Penetapan KKPD</b>	<b>674.105,80</b>	<b>KKPD/KKP3K</b>	<b>849.969,66</b>	<b>578.435,83</b>	
1.	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara	1.755,15	Tanalili Kab. Luwu Utara	1.510,53		
2.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Pangkajene/KKPD Tupabiring	66.870	Liukang Tuppabiring Kab. Pangkep	63.582,49	63.407,23	SK Menteri KKP nomor 71 tahun 2022

No	Pentepana KKPD (Data Base Line Awal)	Luas (Ha)	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Luas Kawasan Konservasi berdasarkan SK Menteri KKP	Keterangan
3.	Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkep KKPD Liukang Tangayya	171.931,71	Pulau Liukang Tangaya Kab. Pangkep	508.534,4	505.862,3	SK Menteri KKP nomor 72 tahun 2022
4.	Kawasan Konservasi Teluk Bone (SK Pencadangan Gubernur)	423.942	Teluk Bone (Bone dan Sinjai)	238.093,55		
5.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kep. Selayar Pulo Pasi Gusung (SK Pencadangan Gubernur)	5.018	Pasi Gusung Kep. Selayar	1.769,73	1.780,05	Proses penetapan SK menteri
6.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kep. Selayar Pulo Kauna Kayuadi (SK Pencadangan Gubernur)	3.983	Kayuadi Kep. Selayar	6.899,43	6.892,41	Proses penetapan SK menteri
7.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Barru/KKPD Panikiang	605.94	Pulau Pannikiang Kab. Barru	496,8	496,8	Proses penetapan SK menteri
8.			Bilongka Luwu	1.212,28		
9.			Malili Luwu timur	1.583,63		
10.			Pulau Lanyukang Makassar	1.659,99		
11.			Pulau Sembilan Sinjai	13.190,15		
12.			Pulau Tanakeke Takalar	11.372,6		
13.			KKM Bontobahari pembuatan kapal Phinisi Bulukimba	64,18		
<b>A.</b>	<b>B. Daerah Perlindungan Laut</b>				<b>308,35</b>	
	Rehabilitasi/Konservasi (Ha) Mangrove (Ha)				307,24	
	Rehabilitasi/Konservasi Terumbu Karang (Ha)				1,1061	
	Rehabilitasi/Konservasi Padang Lamun (Ha)				-	
	<b>Total Kawasan Lindung Perairan (A+B)</b>				<b>578.743,88</b>	

Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dan Pulih Kembali karena dilakukan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, sosialisasi pantai berseri sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi ekosistem pesisir. Aksi tersebut membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan perairan.



Awal penanaman Maret 2023



Monitoring Desember 2023

Aksi tanam mangrove, transplantasi karang sebagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir, sosialisasi pantai berseri sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga jelesatrian sumberdaya laut dengan menjaga kebersihan pantai, pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah

#### INDIKATOR

#### PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

Formulasi untuk mengukur proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah :

$$\text{Proporsi tangkapanm ikan} = \frac{\text{Jumlah tangkapan tahun } n}{80 \% \text{ dari tangkapan maksimum lestari yaitu } 743.776 \text{ ton}} \times 100 \%$$

Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.776 ton. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga

batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan < 100%.

Tabel 40  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran V  
Proporsi Tangkapan Ikan Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun-					Tahun 2023 (akhir RPJMD)			Target Nasional
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Target	Capaian	
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,92	53,59	52,18	56,12	58,72	58,72	38,58	152,2	42,44

Pada tahun 2022 realisasi proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebesar 58.72 % atau mencapai 152,2 % dari target. Proporsi tangkapan mengalami peningkatan sebesar 1,8 % dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka telah dicapai 134,83 %. Peningkatan tersebut disebabkan produksi tangkap naik di tahun 2022. Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan karena sebagai data kontrol produksi perikanan tangkap untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC).



Tabel 41.  
Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman  
Tahun 2018- 2023

Indikator	Realisasi Tahun -					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tangkapan Ikan (Ton)	366.540,6	398.565,2	389.208,2	417.410,7	436.749,6	436.749,6
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari (Ton)	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	49,3	53,59	52,33	56,12	58,72	58,72

Dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman masih dibawah angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman. Upaya yang dilakukan adalah bantuan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, patroli pengawasan untuk memantau penggunaan alat tangkap nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak (*destructive fishing*) seperti yang banyak ditemukan adalah bahan peledak. Serta fasilitasi penerbitan perizinan perikanan tangkap yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan fungsi menjaga kelestarian fungsi sumberdaya ikan.



Apartemen ikan dibangun untuk menjadi rumah ikan yang terumbu karangnya telah rusak dan mati agar dapat menjadi tempat hidup baru, tempat berkembang biak, dan habitat baru untuk ikan dan biota karang lainnya

### INDIKATOR

### PERSENTASE PENURUNAN TINDAKAN IUU FISHING

Persentase penurunan tindakan IUU fishing di dapatkan dengan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani tahun } n - \text{jumlah kasus yang ditangani tahun } n-1}{\text{jumlah kasus yang ditangani tahun } n} \times 100 \%$$

Tabel 42.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun -					Tahun 2023		
	2018	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Target	Capaian
Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	*	*	*	83,33	40,91	23,08	35,71	64,62

Tabel 43.  
Jumlah Penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

NO	Unit Kerja	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun
		2020	2021	2022	2023
1	CDK Wilayah Selatan	1	3	-	-
2	CDK Maminasata	2	4	2	1
3	CDK Bosowasi	1	8	7	5
4	CDK Ajatappareng	-	-	-	-
5	CDK Luwu Raya	-	-	-	-
6	CDK Selayar	-	3	1	-
7	CDK Pangkep	8	4	3	4
<b>TOTAL KASUS</b>		12	22	13	10
<b>Persentase penurunan kasus</b>		(data base line)	50,01 %	155,43 %	64,62 %

Pada tahun 2023 realisasi persentase penurunan tindakan IUU fishing sebesar 23,08 % atau mencapai 64,62 % dari target. Jumlah kasus yang ditangani tahun 2022 sebanyak 13 kasus turun menjadi 10 kasus di tahun 2023. Persentase penurunan tindakan IUU fishing mencapai target 64,62 % dan turun 43,59 % dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dominasi penanganan kasus adalah penggunaan bom , penggunaan alat penangkap ikan yang yang dilarang dan merusak yang kebanyakan di daerah wilayah CDK Pangkep dan CDK Bosowasi. Luasnya wilayah laut yang perlu diawasi sehingga kendala yang dihadapi adalah keterbatasan untuk mengawasi kegiatan destructive fishing mulai dari keterbatasan personil pengawasan dan sarana pengawasan untuk menjangkau wilayah yang sangah luas. Hal yang perlu dilakukan adalah perlunya melibatkan Peran Serta Masyarakat dalam pengawasan sumberdaya untuk atasi Destructive Fishing melalui sosialisasi dan rapat koordinasi pengawasan melibatkan seluruh pihak terkait, pembinaan pokmaswas, SDM pengawasan yang terdidik dan

terlatih dalam keahlian pengawasan dan serta sarana prasarana pengawasan yang memadai

Capaian indikator sasaran strategis penurunan tindakan IUU fishing dan indikator sasaran strategis proporsi tangkapan ikan berada dalam batasan biologi yang aman indikator pembentuknya yaitu capaian indikator program **Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Kelautan dan perikanan.**

Tabel 42.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis IV IKU 4

Sasaran Srategis IV	Meningkatnya Kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
IKU 6	Proporsi tangkapan ikan berada dalam batasan biologis aman
IKU 7	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing
Indikator Kinerja Pembentuk	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikana terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Program	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

#### a. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

$$x = \sum_{i=1}^n \left( \frac{ci}{si} \right) \cdot 100\%$$

n

Keterangan:

x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh

s\_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa

i: jenis komponen pelaku usaha KP

n: jumlah komponen pelaku usaha KP

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencapai target 62,72 % dan turun 40 % dibandingkan tahun 2022. **Capaian Kinerja persentase kapatuhan pelaku usaha masih rendah disebabkan** pemenuhan dokumen perizinan tidak ada/tidak lengkap/masa berlaku habis karena beralihnya proses perizinan yaitu melalui OSS, tidak adanya aksesibilitas untuk mengurus perizinan menyebabkan pelaku usaha belum memahami pemenuhan standar/aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku . Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha atas peralihan pengurusan dokumen perizinan maka akan dilakukan kampanye “AYO LENGKAPI” (Tertib Dokumen Kapal Penangkap Ikan) untuk memberikan informasi, sosialisasi pemenuhan dokumen kapal, membantu nelayan mengakses pelayanan melalui Gerai Perizinan yang ada di Pelabuhan Perikanan nelayan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang masih baru dengan melibatkan penyuluh setempat untuk pemenuhan standar /aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 43.  
Perkembangan Tingkat kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan perikanan  
Tahun 2021 -2023

Indikator Kinerja	Realisasi tahun				Tahun 2023 (akhir RPJMD)		
	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023	Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	-	-	69,18	94,01	56,35	89,85	62,72

Hasil pengawasan kepatuhan pelaku usaha sebagaimana tabel berikut :

Tabel 44.  
Capaian Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan & Perikanan Tahun 2022

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa				Persentase Kepatuhan (%)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	371	357	403	554	63,07	63,87	81,14	77,98
2	Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	-	-	8	7	-	-	100	57,14
3	Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	2	2	-	-	100	50,0
4	Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	5	3	-	-	100	33,33
5	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	9	7	-	-	88,89	100
6	Pemanfaat ruang laut	-	-	-	5	-	-	-	20

Tabel 45.

Jumlah Sarana Prasarana Pengawasan di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

Sarana Kapal Pengawas Perikanan	
Speed Boat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 02</b>	CDK Ajatappareng
Speed Boat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 04</b>	CDK Bosowasi
Speedboat Pengawasan SDKP 8,5 Meter <b>Mangiwang 06</b>	CDK wilayah Selatan
SpeedBoat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 03</b>	CDK Maminasata
SpeedBoat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 05</b>	CDK Selayar
Speed boat pengawasan 12 meter <b>Mangiwang 01</b>	CDK Pangkep

Aksi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dilapangan , sosialisasi IUU fishing dan dibuka gerai perizinan di Cabang Dinas dan UPT Pelabuhan agar memudahkan nelayan untuk mengakses pengurusan dokumen kapal/perizinan kapal yang dibutuhkan, dan fasilitasi NIB bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.



Penguatan Sinergi dengan Penegak Hukum :  
 Operasi bersama di laut dan di darat  
 Pertukaran data/informasi  
 Penanganan tindak pidana perikanan  
 Peningkatan Kerjasama melalui PKS/MoU  
 Penerbitan SK Forum Koordinasi Tindak Pidana  
 Bidang Kelautan dan Perikanan





Patroli Pengawasan SDKP untuk memantau aktivitas penangkapan ikan dan Sosialisasi IUU fishing dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap nelayan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku

ncapaian

Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan SDKP dilaksanakan 2 program sebagai berikut :

1. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil dengan terdiri dari kegiatan

- a) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil Indikator Capaian Kegiatan 1) Jumlah sarana prasarana



pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil dengan Target 18 unit realisasi 18 unit, 2) Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota



laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan target 441 unit realisasi 417 unit.



Pengadaan perlengkapan pengawas dan perahu pengawas perikanan

- b) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah unit usaha perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang mendapatkan pengawasan yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan dengan Target 8 unit realisasi 8 unit.

2. Program pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari kegiatan :

- a) Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Capaian Kegiatan

rehabilitasi dengan target 75,9 Ha dan realisasi 84,7 Ha, mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi berupa Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)





## SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat 3 indikator dalam mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu (1) nilai SAKIP OPD, (2) persentase capaian kinerja program perangkat daerah dan (3) persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti.

Tabel 46.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,41	85,8	99,29
	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	99,0	136,4	137,77
	Persentase Nilai Temuan material LHP yang ditindaklanjuti	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis</b>				<b>112,36</b>

INDIKATOR	NILAI SAKIP OPD
-----------	-----------------

Formulasi Data Nilai SAKIP Organisasi Perangkat daerah diperoleh dari :

**Nilai Sakip OPD = Lembar hasil Evaluasi Inspektorat**

Nilai SAKIP OPD adalah nilai yang didapatkan dari evaluasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi yang bersifat tahunan, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I indikator Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun -				Tahun 2023			Target Nasional
	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Taregt	Capaian	
Nilai sakip OPD	85,61	85,78	83,70	85,80	85,80*	86,41	99,29	A

Tahun 2022, nilai SAKIP belum terealisasi karena menunggu jadwal pemeriksaan Tim Inspektorat yang biasanya dijadwalkan di triwulan ke II tahun berjalan. Untuk itu digunakan data sementara yaitu nilai SAKIP realisasi tahun 2023 sebesar 85,80. Nilai sakip Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 belum tersedia, oleh karenanya data proyeksi capaian 2023 menggunakan data tahun 2022. Realisasi mencapai 99,29 %. Jika dilihat dari realisi lima tahun terakhir **nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan kategori A. Pencapaian kinerja didukung oleh adanya komitmen dari pimpinan OPD dan pimpinan unit kerja dalam melaksanakan program kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan , dan moneyv, untuk memastikan tercapainya target serta perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja.** Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP adalah komitmen pimpinan khususnya pimpinan masing-masing unit kerja karena dalam penyelenggaraan

SAKIP tidak hanya berupa penyusunan berbagai macam dokumen melainkan dibutuhkan pula dukungan dan keterlibatan aktif dari pimpinan untuk ikut serta dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan proses evaluasi. Selain itu dibutuhkan penerapan sistem kerja yang kolaboratif antar unit kerja/antar OPD untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Adanya perubahan penilaian di sub komponen penilaian SAKIP dimana sub komponen Pemanfaatan awalnya 24 % menjadi menjadi 50 % perlu menjadi perhatian agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah benar-benar bisa terimplementasikan di unit kerja.

## LAMA (PermenPANRB 12/2015)

Sistem AKIP	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL
Perencanaan Kinerja	7%	17,5%	10,5%	30%
Pengukuran Kinerja	4%	10%	6%	25%
Pelaporan Kinerja	3%	7,5%	4,5%	15%
Evaluasi	2%	5%	3%	10%
				80%
Kinerja	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL
CAPAIAN KINERJA	5%	5%	10%	20%

## Baru (PermenPANRB 88/2021)

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Tabel 48.  
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun  
2018-2022

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2018	2019	2020	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2021	2022
Pernyataan Kinerja	30	28,35	28,05	27,89	Pernyataan Kinerja	30	25,5	25,50
Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,31	20,63	Pengukuran Kinerja	30	24,6	25,50
Pelaporan Kinerja	15	13,83	13,83	12,49	Pelaporan Kinerja	15	11,1	12,30
Evaluasi Internal	20	15,54	16,47	17,69	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	22,5	22,50
Pencapaian Kinerja	10	7,18	6,95	7,08				
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>84,59</b>	<b>85,61</b>	<b>85,78</b>	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>83,7</b>	<b>85,80</b>
<b>Kategori</b>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>			<b>A</b>	<b>A</b>

Hal yang perlu menjadi perhatian dari rekomendasi Tim Evaluator tanggal 26 Juli 2023 untuk dilakukan perbaikan adalah :

- Menjaga kualitas serta konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya.
- Melengkapi kembali pohon kinerja (Cascading) yang menampilkan tugas dan tanggung jawab unit kerja
- Melakukan Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan bantuan teknologi informasi (Aplikasi) untuk lebih meningkatkan kualitas dan konsistensi pengukuran secara berjenjang
- Melengkapi hasil evaluasi rencana aksi dengan laporan membuat permasalahan, tindak lanjut dan rekomendasi sebagai bahan laporan ke pimpinan
- Dalam dokumen laporan kinerja perlu menyajikan informasi terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional (benchmark kinerja)

- f. Membuat SOP mekanisme evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan per triwulannya.

Berdasarkan rekomendasi tersebut dilakukan perbaikan yaitu :

- a. Telah dilakukan perbaikan pada pohon kinerja (cascading) menyesuaikan dengan dokumen perencanaan (Renstra) tabel 6.1 dan Lakip tabel 43
- b. Telah dilakukan perbaikan Pohon Kinerja (Cascading) yang menampilkan tugas dan tanggungjawab Sekretaris.
- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja telah menggunakan aplikasi SIMPELMO (Sistem Informasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).
- d. Telah Dibuat Evaluasi Rencana Aksi dilengkapi Permasalahan, tindak lanjut dan rekomendasi sebagai laporan ke pimpinan.
- e. Hasil koordinasi dengan Biro Perencanaan KKP didapatkan target kinerja tahun 2023 (Perjanjian Kinerja) antara Kepala Dinas dan Eselon I KKP yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target kinerja. Dari target kinerja tersebut akan menjadi bahan perbandingan kinerja yaitu indikator yang selaras dengan target kinerja Dinas kelautan dan perikanan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Lakip untuk membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) sesuai juknis pelaporan kinerja permenpan 53 tahun 2014
- f. Telah dibuat SOP mekanisme evaluasi akuntabilitas kinerja internal

## INDIKATOR

## PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Cara menghitung indikator kinerja Capaian kinerja program perangkat daerah :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja Program} = \text{Lembar hasil Evaluasi}$$

Tabel 49.

## Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun				Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2019	2020	2021	2022	Realisasi	Taregt	Capaian	
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	94,00	82,34	109,07	97,86	136,92	99,0	138,30	-

Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah terealisasi 136,9 % atau mencapai target 138,3 % dan naik 40,36 % .Capaian kinerja program melampaui target yang ditetapkan disebabkan adanya indikator program yang jauh melampaui target yaitu indikator Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP dimana jumlah temuan tahun 2022 sebanyak 26 temuan menjadi 8 temuan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan temuan adalah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pokok-pokok temuan agar tidak menjadi temuan dalam LHP inspektorat. Capaian program dapat dilihat pada lembar hasil evaluasi tabel 11 berikut :



Tabel 49.  
Persentase Capaian Kinerja Program tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
A	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp M)	9,210.12	13.284,55	144,24	130,8
		Produksi Perikanan tangkap (ton)	413,030.80	492.159,5	119,16	107,8
		Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	78.95	89.47	113,33	100
		Cakupan Bina Kelompok nelayan (%)	30.25	22.93	75,80	101,2
		Persentase produksi perikanan kelompok nelayan (%)	27.17	-	-	109,9
B	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya (Rp M)	15,958.39	18.157,93	113,78	142,7
		Produksi Perikanan budidaya (ton)	4,298,391.1	4.128.072,6	96,04	100,1
		Persentase Ketersediaan benur berkualitas (%)	100	112,58	112,58	78,5
C	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan PPK	Produksi garam rakyat (ton)	48,450	114.958,88	237.27	6,9
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%)	100	56,57	56,57	66,8
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67.31	68,09	101,16	121,77
D	Program Pengolahan dan	Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan nonkonsumsi (Rp M)	317,28	502,56	158,4	114,1



No	Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
	pemasaran hasil perikanan	Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	5.544,1	7.235,83	130,51	108,7
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	100	97,40	97.40	76.65
E	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	89.85	56,35	62,72	105.9
F	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100	95.28	95.28	99.7
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik	100	100	100	99.5
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	10.53	69.20	657,17	75,03
Rata-rata Capaian Program					136,92	97,86

## INDIKATOR

PERSENTASE NILAI TEMUAN MATERIAL LHP YANG DITINDAK LANJUTI

Tabel 50.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Tahun 2023 (Akhir RPJMD)			Target Nasional
	2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Taregt	Capaian	
Persentase Nilai temuan material LHP yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	-

Selama tahun 2022 Tim Inspektorat melaksanakan Audit sebanyak 3 kali. Dari hasil audit tersebut terdapat 26 temuan. Perkembangan hasil tindaklanjut audit oleh Tim Inspektorat sebagaimana tabel 51. Jumlah temuan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tabel 13 menunjukkan bahwa jumlah temuan paling banyak di tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Tahun 2023 kembali turun menjadi 8 temuan dimana penurunan temuan ini sangat signifikan.

Tabel 51.  
Temuan material LHP tahun 2023

Tahun	Jumlah Temuan	Dalam proses	Sudah selesai ditindaklanjuti	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	Keterangan
2019	28	-	28	100 %	
2020	45	-	45	100 %	
2021	28	-	28	100%	
2022	26	2	24	92,31 %	2 LHP belum selesai ditindaklanjuti terkait asset kendaraan roda 2 dan roda 4 dibawah penguasaan pegawai pension
2023	8	8	-	-	

Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan apresiasi sebagai OPD yang cepat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat. Tahun 2023 apresiasi tersebut tidak didapatkan karena belum selesainya beberapa temuan



disebabkan temuan tersebut terkait aset dan kebijakan retribusi dimana tindak lanjut memerlukan peran dari pihak lain.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran I**

Sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dicapai melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah dengan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu target 7 dokumen realisasi 7 dokumen.
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan dinas kelautan dan perikanan target Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dengan Target 61 laporan realisasi 61 laporan.
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dinas kelautan dan perikanan target persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target 100% realisasi 100%.
4. Administrasi umum perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dinas kelautan dan perikanan target Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target 100 % realisasi 100%.
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

target Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target 12 bulan realisasi 12 bulan.

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan target Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan Target 42 unit realisasi 42 unit.

### 3.2. KINERJA ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2022 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, sebesar Rp. 2.685.630.000,- realisasi sebesar Rp. 3.013.005.180,- (112,19 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 52.  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023

U R A I A N	Target (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2.685.630.000</b>	<b>2.908.411.150</b>	<b>3.013.005.180</b>	<b>2.828.654.450</b>	<b>112,19</b>	<b>97,26</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pergub. No. 88 Thn 2018)	942.700.000	1.069.597.100	932.942.080	1.042.662.000	98,96	97,48

U R A I A N	Target (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Perda No. 12 Thn 2019)	304.330.000	338.650.650	488.649.600	296.073.400	160,57	87,43
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Perda No. 12 Thn 2019)	432.000.000	500.000.000	435.026.000	400.126.000	100,70	80,03
Retribusi Penyelenggaraan Perizinan (Perda No.88 Thn 2018)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.121.870.000	1.086.506.250	112,19	108,65
Pendapatan lain-lainya	-	163.400	27.917.500	3.286.800	-	2.011
Hasil sewa BMN	6.600.000	-	6.600.000	-	100	-

Secara total target PAD telah melampaui target namun masih terdapat item penerimaan PAD yang belum mencapai target dan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kerjasama sewa tambak target Rp 157.000.000 terealisasi Rp 107.000.000 atau mencapai 68,15 % disebabkan beberapa tambak yang rusak sehingga tidak ada yang bersedia untuk menyewa 2.adanya penyewa tambak yang tidak membayar sesuai nilai sewa yang disepakati karna tambak yang rusak dan gagal panen
2. Sewa rumah dinas target Rp 28.200.000 teralisasi Rp 23.770.000 atau 84,29 % disebabkan Rumah dinas yang di tinggal penggunaannya(purnabakti) beberapa dalam kondisi rusak parah sehingga tidak dapat di sewakan kembali.
3. Retribusi layanan kepelabuhanan jasa hasil lelang target Rp 20.000.000 terealisasi Rp 12.400.750 atau 62 % disebabkan MOU PKS antara Kab dan Provinsi masih dalam proses perampungan

## b. Belanja

Tahun 2023, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 100.020.581.653,- dan total realisasi sebesar Rp 74.406.26-.451,5,- ( 74,39 %), dan realisasi fisik 95,28 % . Penyebab tidak maksimalnya realisasi anggaran dan realisasi fisik adalah dominasi permasalahan Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak terbit/terlambat terbit menyebabkan realisasai dan keuangan fisik tidak mencapai 100 %. Perlu konsistensi antara anggaran kas dengan penerbitan SPD secara kolektif sesuai permintaan OPD di awal tahun utamanya kegiatan prioritas dan kegiatan fisik sebagai pembuka pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan bisa berlangsung dengan teratur dan sesuai perencanaan.

Tabel 53.  
Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2023

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38,278,920,637.0	34,612,687,090.0	90.42	96.86	3,666,233,547.0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,089,191,000.0	1,374,838,743.0	65.81	94.00	714,352,257.0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	571,811,800.0	241,084,638.0	42.16	79.12	330,727,162.0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14,223,100.0	11,338,000.0	79.72	100.00	2,885,100.0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16,214,300.0	12,190,000.0	75.18	100.00	4,024,300.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,918,000.0	15,908,200.0	88.78	100.00	2,009,800.0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	28,673,500.0	25,693,000.0	89.61	100.00	2,980,500.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,425,067,500.0	1,055,310,105.0	74.05	99.58	369,757,395.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,282,800.0	13,314,800.0	87.12	100.00	1,968,000.0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,157,399,114.0	24,865,946,001.0	98.84	99.99	291,453,113.0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,021,349,114.0	24,734,155,601.0	98.85	100.00	287,193,513.0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,432,200.0	2,222,400.0	91.37	100.00	209,800.0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,529,800.0	3,329,500.0	94.33	100.00	200,300.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,405,000.0	6,145,000.0	95.94	100.00	260,000.0
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35,770,000.0	33,799,750.0	94.49	94.66	1,970,250.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	87,913,000.0	86,293,750.0	98.16	98.35	1,619,250.0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89,224,150.0	86,952,150.0	97.45	100.00	2,272,000.0
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,690,700.0	2,690,700.0	100.00	100.00	0.0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80,073,450.0	79,786,450.0	99.64	100.00	287,000.0
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6,460,000.0	4,475,000.0	69.27	100.00	1,985,000.0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30,040,000.0	30,015,000.0	99.92	100.00	25,000.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	30,040,000.0	30,015,000.0	99.92	100.00	25,000.0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	425,929,100.0	357,791,170.0	84.00	96.83	68,137,930.0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	23,780,000.0	13,235,000.0	55.66	65.94	10,545,000.0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	333,610,000.0	286,363,000.0	85.84	100.00	47,247,000.0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,246,000.0	4,725,070.0	90.07	93.14	520,930.0
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6,202,400.0	5,502,400.0	88.71	88.71	700,000.0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	57,090,700.0	47,965,700.0	84.02	92.42	9,125,000.0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,389,977,330.0	1,560,094,960.0	65.28	92.66	829,882,370.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,658,600.0	34,203,200.0	90.82	100.00	3,455,400.0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,102,571,930.0	523,642,718.0	47.49	88.25	578,929,212.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	243,072,000.0	221,394,100.0	91.08	100.00	21,677,900.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106,553,000.0	97,673,800.0	91.67	99.06	8,879,200.0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	95,765,000.0	62,770,500.0	65.55	85.14	32,994,500.0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	801,087,800.0	617,141,642.0	77.04	96.19	183,946,158.0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,269,000.0	3,269,000.0	100.00	100.00	0.0



PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146,102,360.0	19,634,000.0	13.44	13.55	126,468,360.0
Pengadaan Mebel	46,102,360.0	19,634,000.0	42.59	42.95	26,468,360.0
Pengadaan Aset Tak Berwujud	100,000,000.0				100,000,000.0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,472,700,939.0	5,206,627,828.0	95.14	99.92	266,073,111.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	947,419,723.0	824,574,563.0	87.03	99.56	122,845,160.0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,525,281,216.0	4,382,053,265.0	96.83	100.00	143,227,951.0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,478,356,644.0	1,110,787,238.0	44.82	69.56	1,367,569,406.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,238,110,944.0	661,017,892.0	53.39	95.72	577,093,052.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141,545,700.0	116,730,090.0	82.47	92.99	24,815,610.0
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	129,000,000.0	79,000,000.0	61.24	100.00	50,000,000.0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	969,700,000.0	254,039,256.0	26.20	28.69	715,660,744.0
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	13,535,671,100.0	8,838,269,191.0	65.30	85.93	4,697,401,909.0
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	12,198,683,100.0	8,668,070,331.0	71.06	90.59	3,530,612,769.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	992,410,000.0	254,543,941.0	25.65	65.53	737,866,059.0
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11,206,273,100.0	8,413,526,390.0	75.08	92.81	2,792,746,710.0
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1,830,000.0			42.62	1,830,000.0
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1,830,000.0			42.62	1,830,000.0
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,335,158,000.0	170,198,860.0	12.75	43.38	1,164,959,140.0
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	634,465,000.0	124,714,000.0	19.66	83.04	509,751,000.0
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	673,050,000.0	29,644,000.0	4.40	4.97	643,406,000.0
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	27,643,000.0	15,840,860.0	57.31	68.53	11,802,140.0
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	37,410,867,789.0	25,347,693,829.0	67.75	98.01	12,063,173,960.0
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	13,675,717,000.0	5,814,984,200.0	42.52	97.17	7,860,732,800.0
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	7,626,421,000.0	3,338,156,000.0	43.77	99.97	4,288,265,000.0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6,049,296,000.0	2,476,828,200.0	40.94	93.65	3,572,467,800.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	206,914,000.0	5,880,000.0	2.84	99.76	201,034,000.0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	206,914,000.0	5,880,000.0	2.84	99.76	201,034,000.0
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	18,389,800.0	16,284,800.0	88.55	94.18	2,105,000.0
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	18,389,800.0	16,284,800.0	88.55	94.18	2,105,000.0
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	23,509,846,989.0	19,510,544,829.0	82.99	98.49	3,999,302,160.0
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	64,100,000.0	51,830,000.0	80.86	86.02	12,270,000.0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	23,243,396,389.0	19,269,171,999.0	82.90	98.51	3,974,224,390.0
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	202,350,600.0	189,542,830.0	93.67	100.00	12,807,770.0
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5,314,667,527.0	1,861,833,577.0	35.03	88.79	3,452,833,950.0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3,037,416,000.0	960,390,200.0	31.62	80.71	2,077,025,800.0
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2,876,890,000.0	929,878,200.0	32.32	84.75	1,947,011,800.0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	50,006,000.0				50,006,000.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47,840,000.0	30,512,000.0	63.78	27.97	17,328,000.0
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	62,680,000.0				62,680,000.0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2,277,251,527.0	901,443,377.0	39.58	99.57	1,375,808,150.0
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,545,447,027.0	467,852,127.0	30.27	99.86	1,077,594,900.0
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	731,804,500.0	433,591,250.0	59.25	98.95	298,213,250.0
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,627,801,000.0	2,693,570,950.0	74.25	97.57	934,230,050.0
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3,589,696,000.0	2,656,547,450.0	74.00	97.57	933,148,550.0
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	77,555,100.0	75,024,134.0	96.74	99.06	2,530,966.0
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3,275,470,900.0	2,349,238,316.0	71.72	97.36	926,232,584.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	17,830,000.0	17,830,000.0	100.00	100.00	0.0
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	218,840,000.0	214,455,000.0	98.00	100.00	4,385,000.0
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	38,105,000.0	37,023,500.0	97.16	97.70	1,081,500.0
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10,060,000.0	9,300,000.0	92.45	95.03	760,000.0
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	10,860,000.0	10,540,000.0	97.05	100.00	320,000.0
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17,185,000.0	17,183,500.0	99.99	97.82	1,500.0
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,852,653,600.0	1,052,205,814.50	56.79	89.91	800,447,785.50
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1,851,902,200.0	1,052,205,814.50	56.82	89.95	799,696,385.50

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	100,020,581,653.0	74,406,260,451.50	74.39	95.28	25,614,321,201.50
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	451,092,200.0	192,827,060.0	42.75	65.16	258,265,140.0
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	1,400,810,000.0	859,378,754.50	61.35	97.93	541,431,245.50
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	751,400.0				751,400.0
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	351,400.0				351,400.0
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	400,000.0				400,000.0

## PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

kegiatan tidak dilaksanakan
Rakor pembangunan kelautan dan perikanan Rp 100.000.000 tidak dilaksanakan karena SPD tidak terbit
Pengadaan Printer Pengelola Data Perencanaan 4 unit Rp 19.375.000 tidak terealisasi SPD tidak terbit
Pengadaan Alat Pengelola Data Statistik Printer Rp 5.000.000 tidak terealisasi karena SPD tidak terbit
Mesin Absensi Spesifikasi : Finger print 1 unit Rp 8.100.000 karena SPD tidak terbit
Sekretariat AC 4 unit Rp 29.000.000, Laptop 2 unit Rp 32.000.000, Printer 1 unit Rp 18.500.000 karena SPD tidak terbit
CDK Ajatappareng 1 unit Laptop Rp 15.000.000 SPD tidak terbit
CDK Bosowasi 1 unit Laptop Rp 22.358.700 SPD tidak terbit
PBAPL 1 unit AC Rp 5.848.500 tidak terlaksana karena SPD tidak terbit
Sekretariat pengadaan mebel Rp 7.800.000 tidak terealisasi karena SPD tidak terbit
Aplikasi nelayan Rp 100.000.000 tidak dilaksanakan karena SPD tidak terbit
Sekretariat : ruang laktasi Rp 75.000.000, LONGUE DAN FRONT OFFICE Rp 206.000.000, Rehab Ruang Pimpinan Rp 206.000.000, Rehabilitasi Toilet Kantor Lantai 1 dan Lantai 2 Rp 154.500.000, Pekerjaan Rehab/Pemeliharaan Pagar BBI Lajoa disebabkan waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan

## PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

kegiatan tidak dilaksanakan
Bimbingan teknis mitigasi pesisir dan temu koordinasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi (Rp 121.702.000) tidak terlaksana karena SPD tidak terbit
Aplikasi pengembangan data based mangrove MONTERE Rp 200.000.000 tidak terealisasi karena SPD terlambat terbit
CDK Selayar : transplantasi karang Rp 185.000.000 SPD tidak terbit, tambatan perahu Rp 206.000.000 SPD terlambat terbit sehingga waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan
CDK Ajatappareng : transplantasi karang Rp 185.000.000 SPD tidak terbit
Kelompok Usaha Garam Rakyat Tapaang Tiga Desa Kec Liukang Tangaya Kab Pangkep Sarana Inovasi Garam Rp 100.000.000 karena SPD tidak terbit
Sarana prasarana usaha garam rakyat (gudang garam) 4 kelompok dengan pagu Rp 642.000.000 tidak terealisasi karena SPD terlambat terbit

## PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

## kegiatan tidak dilaksanakan

Alat tangkap : KELOMPOK NELAYAN KURNIA ILAHI KAB. KEPULAUAN SELAYAR Bahan Alat Tangkap Jaring Gill Net 1 paket Rp 100.000.000, KUB. BERKAH LAUT KEL. PONTAP KEC. WARA TIMUR KOTA PALOPO Bahan Alat Tangkap Jaring Purse Seine 1 paket Rp 200.000.000 karena SPD tidak terbit

Bantuan Mesin KUB Sinar Marannu Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kab Takalar Mesin Spesifikasi : 30 PK 1 unit Rp 60.000.000 karena SPD tidak terbit

Alat pengelola data sarana penangkapan 1 unit Rp 23.000.000 karena SPD tidak terbit

UPT Pelabuhan wilayah I : pakaian dinas lapangan Rp 33.000.000 SPD tidak terbit

UPT Pelabuhan wilayah II : PENYUSUNAN AMDAL PPI BEBA KAB. TAKALAR dan pertimbangan teknis Rp 110.000.000 karena SPD tidak terbit



## PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

## kegiatan tidak dilaksanakan

KELOMPOK BINA BAHARI DESA MUNTE KEC. TANALILI KAB. LUWU UTARA Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket Rp 50.000.000 proposal tidak terbit

KELOMPOK KATOJOA, KELOMPOK PRIMA KATOJOA, KELOMPOK SAHABAT BAHARI KEC. LABAKKANG KAB. PANGKEP Sarana Budidaya Rumput Laut 30 paket Rp 150.000.000 SPD tidak tersedia

Kelompok Masagenae Kec Sajoanging Kabupaten Wajo Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket Rp 50.000.000 terdaftar penerima bantuan dari pusat

KELOMPOK PADAELO KEC. MANDALLE KAB. PANGKEP Sarana Budidaya Rumput Laut 10 paket Rp 50.000.000 SPD terlambat terbit sehingga waktu tidak mencukupi untuk pengadaan

Pokdakan Benna'e Desa Cege Kec. Mare Kab Bone Sarana Budidaya 19 paket Rp 95.000.000 SPD terlambat terbit sehingga waktu tidak mencukupi untuk pengadaan

Pengadaan Operasional Budidaya KJA Rp 50.006.000 Waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan

Bahan kimia UPT PBAPL dan perlengkapan pengujian sebesar Rp 15.240.000 SPD terbit dibulan November sehingga waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Rp 62.680.000 tidak dilaksanakan karena SPD tidak tersedia



**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN****kegiatan tidak dilaksanakan**

CDK ajatappareng : pakaian lapang pengawas Rp 27.500.000 dan laptop 1 unit Rp 15.000.000 SPD tidak terbit

**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN****kegiatan tidak dilaksanakan**

Edukasi Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan Rp 157.168.200 SPD tidak terbit

**3.3. Efisiensi penggunaan sumber daya sasaran**

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi :

- a. data capaian Sasaran Strategis;
- b. data pagu anggaran dan data realisasi anggaran.

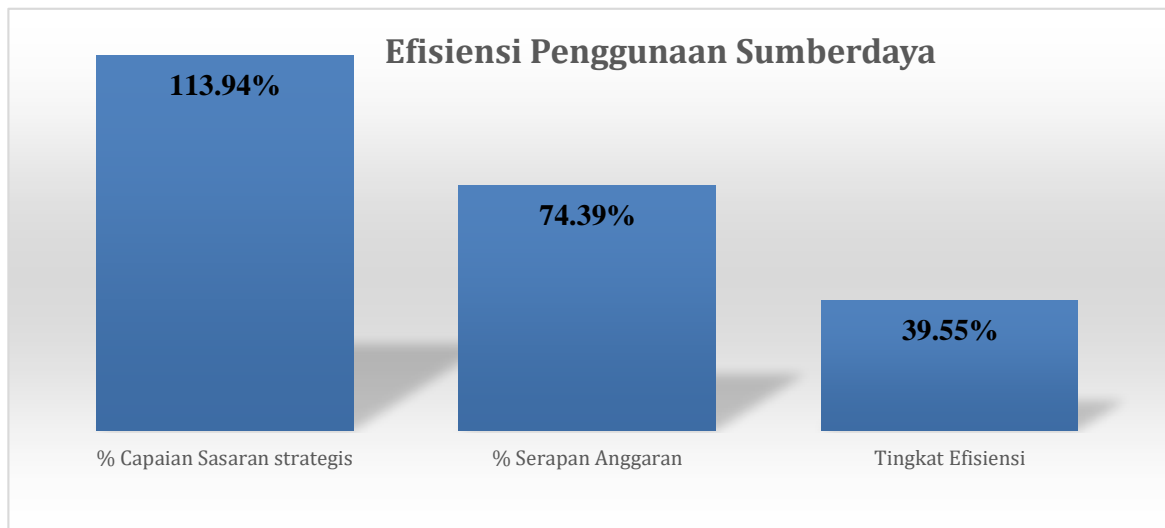
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 54. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% nilai Kineeja	Efisiensi
I	Sasaran Strategis : Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Menambah jumlah produksi dan produktivitas Produksi	44,496,693,316	27,600,922,966	62.03%	126.62%	64.59%
II	Sasaran Strategis : Meningkatnya Konsumsi Ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	1,852,653,600	1,052,205,815	56.79%	107.89%	51.10%
III	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	13,901,020,800	5,837,149,000	41.99%	108.04%	66.05%
IV	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	15,392,314,100	8,617,072,491	55.98%	114.63%	58.64%
V	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	38,278,920,637	34,612,687,090	90.42%	112.53%	22.11%
<b>Kinerja Organisasi</b>		<b>100,020,581,653</b>	<b>74,406,260,452</b>	<b>74.39%</b>	<b>113.94%</b>	<b>39.55%</b>

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar 113,94 % persen sedangkan realisasi anggaran sebesar 74,39 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 39,59 % yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. **Tidak maksimalnya realisasi anggaran karena adanya**

belanja yang tidak terbayarkan dan berdasarkan review Tim Inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, utang sebesar Rp 17.454.776.757 (terdiri dari utang kegiatan ber SPK/SPM/SP2D yaitu 16.928.165.786 sementara utang SPJ TU sebesar Rp 526.610.751). Jika dilihat capaian nilai kinerja organisasi melampaui target kinerja ditetapkan. Telah dilakukan penyesuaian target kinerja di dokumen perencanaan 2024-2024 berdasarkan capaian kinerja serta Optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan melalui koordinasi dan integrasi antar unit kerja dan komitmen bersama mendukung pencapaian kinerja organisasi.



### 3.4. Penghargaan yang Diterima

CDK Pangkep mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi Pemuda Cinta Bahari Anti Bom dan Bius Ikan (PACARITA) yang mengusung konsep pemberdayaan Komunitas Pemuda dengan pendekatan “Kolaborasi Pentahelix”. Komunitas ini diberikan edukasi dan



pendampingan untuk menjadi “The Agent of Change” agar mampu melakukan upaya pencegahan praktik destructive fishing pada masyarakat nelayan dan ikut merehabilitasi terumbu karang untuk pelestarian ekosistem laut. Melalui inovasi ini membawa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

menjadi Juara I OPD Inovatif pada Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat OPD pada Tahun 2023.

Penerimaan

kategori

Pemerintah

Daerah untuk

bidang

perencanaan dan

kepatuhan



regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan PPK diawali karena aturan Perda RTRW yang diintegrasikan dengan RZWP3K yang mana Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama yang melaksanakan integrasi dan juga telah dilaksanakan sosialisasi Perda No 3 Tahun 2022 tentang RTRWP Sulsel, hal ini merupakan salah satu penilaian untuk kategori tersebut

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

Secara umum rata-rata nilai capaian sasaran strategis (kinerja organisasi) tahun 2023 adalah kategori sangat tinggi karena capainnya diatas 100 % sebagaimana tabel berikut :

KODE SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN
SS I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	112,36 %
SS II	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	126,62 %
SS III	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produkkelautan dan perikanan	107,89 %
SS IV	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usahakelautan dan perikanan	108,04 %
SS V	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatansumberdaya alam kelautan dan perikanan	114,63 %
Rata-Rata Capaian		113,91 %

- a. Sepuluh Indikator sasaran strategis /indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target sebagaimana tabel berikut:

KODE SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA
SS I	Nilai saki perangkat daerah (%)	99,29 %	Sangat Tinggi
	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	137.77 %	Sangat Tinggi
	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang	100 %	Sangat Tinggi

KODE SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA
	ditindaklanjuti (%)		
SS II	Produksi perikanan (ton)	99,48 %	Sangat Tinggi
	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Perikanan(%)	153,75 %	Sangat Tinggi
SS III	Konsumsi Ikan	107,89%	Sangat Tinggi
SS IV	Nilai tukar nelayan (NTN)	108,04 %	Sangat Tinggi
SS V	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	123,34 %	Sangat Tinggi
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	155,92 %	Sangat Tinggi
	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	64,62 %	Sedang
Rata- Rata capaian		115,01 %	Sangat Tinggi

- b. Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola anggaran sebesar Rp 100.020.581.653 terealisasi Rp 74.406.451,5,- atau 74,39 % dan realisasi fisik 95,28 %.

#### 4.2. REKOMENDASI

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, rekomendasi perbaikan ke depan :

- a. Perlunya sosialisasi dan fasilitasi terkait perizinan usaha sektor perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha yang memiliki arti penting bagi pelaku usaha yaitu kepastian hukum usaha serta mewujudkan usaha perikanan yang lebih teratur dan bertanggung jawab.

- b. Penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan keberlanjutan perikanan sebagai salah satu upaya adaptasi perubahan iklim dan implementasi ekonomi biru (*blue economy*).
- c. Perlunya memperhatikan kualitas produksi selain kuantitas produksi sebagai upaya menjamin kepastian produk terserap pasar dengan nilai produksi yang menguntungkan.
- d. Penerapan sistem kerja untuk membangun dan memelihara komitmen bersama bersinergi dan berkolaborasi satu dengan lainnya dalam rangka pencapaian target kerja organisasi baik melalui unit kerja internal maupun eksternal mengingat target indikator kinerja dapat dicapai dengan melibatkan semua jajaran unit kerja dan dukungan stakeholder terkait.